

# BAGIAN DUA



Repository University of Riau

<https://repository.unri.ac.id>

 Hak cipta milik Universitas Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

**Merespon secara dini dampak-dampak dinamika ekonomi yang terjadi baik karena faktor ekonomi itu sendiri maupun karena faktor-faktor non-ekonomi, juga sangat urgen dilakukan agar rakyat tidak hanya menerima bencana dan dampak-dampaknya. Co-Vid 19 menular begitu cepat dan massif.**



# CONTINGENCY PLAN COVID-19 DI RIAU

Hak Dipa Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Berbagai upaya penanganan dan penangkalan Corona Virus yang saat ini telah merebak ke berbagai negara telah dilansir pemerintah. Mulai dari bagaimana mencuci tangan dan segala-upaya untuk tidak menyentuh muka bila tangan telah bersentuhan dengan benda lain yang dapat diduga mengandung virus tersebut. Penanggulangan dalam bidang ekonomi nampaknya belum mendapat sentuhan khusus dan terencana dengan baik. Berbeda dengan Malaysia. Dalam dinamika dan kemelut politik yang lagi memanas, Mahatir Muhammad selaku perdana menteri sementara setelah secara resmi mengundurkan diri masih merilis *Paket Ekonomi 2020* sebagai antisipasi mewabahnya virus corona yang berdampak berat bagi perekonomian. Lalu di Riau sebaiknya berbuat apa?

Dampak buruk *Covid-19* ini memang mulai terasa. Nilai rupiah terhadap dolar Amerika ringsek seketika. Saat ini sudah menurun hingga Rp 14.530,- per dolar. Nilai terendah sejak awal tahun 2020 bahkan sejak setahun terakhir. Pelemahan mata uang terhadap dolar Amerika ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Won Korea turun sebesar 5,07 persen. Bath Thailand melorot sampai 6,42 persen, dolar Singapore turun 3,76 persen, dan Ringgit Malaysia terdepresi sebesar 2,91 persen. Resonansi *Covid-19* juga telah mengguncang lantai bursa. IHSG turun tajam dari 6000 menjadi 5200. Dua indikator ekonomi di atas tentunya sudah cukup memberikan sinyal adanya guncangan ekonomi akibat mewabahnya virus tersebut.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Dampak lain masih berlanjut. Impor dari China pun anjlok sampai 39,6 persen. Selama ini China memasok produk-produknya ke Indonesia mencapai 77 % dari total impor Indonesia. Arab Saudi membatalkan semua jamaah umroh untuk masuk ke negaranya. Termasuk dari Indonesia yang masih menggembar-gemborkan sebagai negara yang bebas virus tersebut. Angaporn Airline dan Silk Air menutup 12 penerbangan ke Indonesia.

Pengaruh terhadap perekonomian dari sengkarut *Covid-19* ini memang akan berbeda bagi setiap wilayah sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Bagi Riau sendiri yang perekonomiannya dari sudut pengeluaran, masih sebagian besar dipengaruhi oleh Konsumsi rumah tangga, dampaknya akan terasa cukup signifikan. Dorongan konsumsi rumah tangga selama ini sangat dipengaruhi oleh harga Tandani Buah Sawit (TBS). bila harga TBS naik maka daya beli masyarakat akan meningkat. Namun bila terjadi penurunan harga TBS maka daya beli masyarakat langsung turun dan pertumbuhan ekonomi juga akan merosot. Penurunan daya beli masyarakat ini juga akan memberi efek negatif kepada sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor-sektor lain yang berkait, seperti transportasi, hotel dan restoran serta jasa lainnya.

Tujuan utama komoditas ekspor Riau adalah China yang kontribusinya mencapai 18,20 persen. Komoditas utama yang diekspor ke negara tersebut adalah CPO sebagai turunan utama TBS. India berkontribusi dalam ekspor Riau sebesar 12,11 persen dan komoditas utama yang diekspor juga CPO. Termasuk Belanda dengan kontribusi 7,05 persen dan Malaysia sebesar 5,07 persen. Bila negara-negara tersebut terpaksa membatalkan impor CPO atau bahkan paling tidak mengurangi volume eksportnya maka harga TBS akan langsung anjlok. Tanda-tanda anjloknya ekspor sawit dan turunnya harga TBS sudah mulai terasa. Pendapatan petani sawit langsung akan melorot dan konsumsi rumah tangga dalam struktur perekonomian Riau akan terkoreksi cukup tajam. Untuk mengalihkan peran kepada sektor lain juga sulit karena kendala transportasi dan pembatasan penduduk asing baik masuk maupun ke luar negeri terjadi diberbagai belahan dunia.





Ini memberi indikasi bahwa untuk tahun 2020 dan bahkan jika persoalan *Covid-19* ini tidak tertangani segera maka dinamika perekonomian Riau akan mengalami kemunduran. Bahkan harapan untuk memenuhi ekspor Ikan Patin sebanyak 400 ton per hari ke China sebagaimana yang sudah dilansir Gubernur Riau tentu akan menjadi pesesan kosong belaka. Perlu ada kebijakan khusus untuk menghadapinya. Sudah saatnya gubernur melakukan pertemuan khusus dengan para bupati dan wali kota dengan melibatkan paling tidak ketua-ketua fraksi yang ada DPRD Provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun *Contingency Plan* dalam menampik dampak *Covid-19* ini. Kebijakan pembangunan secara khusus harus ditelorkan agar rakyat tidak lebih sengsara. Baik kebijakan penanganan merebaknya virus tersebut maupun kebijakan ekonomi yang mungkin sama menyakitkan dari virus itu sendiri bila tak tertangani dengan baik.

Beberapa hal mungkin perlu diperhatikan. *Pertama*, menelusuri kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat yang mau tidak mau harus dipenuhi. Tidak lama lagi masyarakat Islam akan menghadapi bulan puasa dan lebaran. Bila segala kebutuhan pokok tidak tersedia dengan baik dan lancar maka akan terjadi kenaikan harga yang berlipat ganda. Tanpa ada pengaruh *Covid-19* saja persoalan harga-harga menjelang ramadhan dan lebaran senantiasa berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah provinsi perlu melakukan rapat terpadu dengan semua dinas terkait provinsi dan seluruh kabupaten/kota seperti perdagangan, perhubungan dan industri.

*Kedua*, mendorong kinerja yang lebih tinggi bagi sektor-sektor produksi yang dapat menghasilkan komoditas dalam jangka waktu pendek sebagai substitusi impor. Terutama sekali komoditas pangan, seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, beras, jagung, dan buah-buahan. Sub-sektor peternakan dan perikanan digesa agar bisa menghasilkan pangan mandiri dan mengurangi ketergantungan dari impor. *Ketiga*, memperkuat industri rumah tangga ke arah produsen ekspor sebagai *supplementary livelihood* dan diversifikasi pendapatan masyarakat. Banyak sekali diberbagai kabupaten



produksi industri rumah tangga yang layak dikembangkan dengan sentuhan teknologi dan jaringan pasar yang kuat.

*Keempat*, mempertajam skala prioritas program pembangunan yang telah dituangkan dalam APBD agar benar-benar memiliki sentuhan jangka pendek terhadap kesiapan daerah menanggulangi segala kemungkinan buruk dari bencana yang muncul. *Terakhir*, tetap menjaga terlaksananya program dengan pengawasan dan pengendalian yang akurat dan terukur sehingga efisiensi dan efektivitasnya semakin optimal.

Seperti halnya persoalan kebakaran hutan dan lahan maka kebijakan menyangkut dampak perekonomian dari persoalan *Covid-19* ini harus lah ditangani secara serius dan khusus. Memperebutkan kursi ketua partai boleh saja tetap berjalan karena itu diperlukan bagi penguatan politik dan implementasi kebijakan. Merespon secara dini dampak-dampak dinamika ekonomi yang terjadi baik karena faktor ekonomi itu sendiri maupun karena faktor-faktor non-ekonomi, juga sangat urgen dilakukan agar rakyat tidak hanya menerima bencana dan dampak-dampaknya. *Covid-19* menjangkit begitu cepat dan *massif*. Kerusakan ekonomi yang ditimbulkannya juga menalar secepat penularan virus itu sendiri. Jadi, janganlah sampai lengah. *Outab lab...!!!*

\*\*\*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Repository of University of Riau

<https://repository.unri.ac.id>

© Hak cipta milik Universitas Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





## UPAYA PEMULIHAN EKONOMI RIAU PASCA COVID 19

Dampak pandemi Covid 19 terhadap perekonomian Riau memang signifikan. Pada Triwulan I 2020 ini terkoreksi mencapai *minus 3,47 persen* dengan Migas dan Tanpa Migas *minus 4,08 persen*. Inilah dampak nyata dari penyebaran Covid 19 tersebut dan amburadulnya kebijakan penanganannya pada masyarakat. Pelaksanaan PSBB ternyata telah benar-benar mematikan perekonomian Rumah Tangga Masyarakat. Dalam struktur perekonomian Riau Konsumsi Rumah Tangga terkoreksi dengan pertumbuhan *minus 1,00 persen*. Padahal kontribusinya mencapai 30,22 persen. Artinya perekonomian masyarakat tidak berjalan sama sekali akibat adanya pembatasan-pembatasan yang tidak mengedepankan kalkulasi yang matang ini.

Kontraksi terbesar justru terjadi pada konsumsi pemerintah yang terkoreksi sampai *minus 16,53 persen*. Ini terjadi akibat tidak berjalannya anggaran pemerintah yang mampu mendorong perekonomian Riau. *Refocusing* yang dilakukan tidak mampu memberi efek positif terhadap perekonomian masyarakat. Mungkin karena kurang tepat sasaran dan pola alokasinya. Pembagian masker misalnya, tidak dilakukan dengan memberdayakan industri rumah tangga sebagai produsen masker yang sempat angka sebelumnya. Dapur umum yang sempat heboh untuk memberikan makanan terhadap masyarakat terdampak tidak dilakukan atas basis ekonomi wilayah pada satuan terkecil tetapi terkesan seperti proyek-proyek. Itu mungkin menjadi sebab *refocusing* anggaran tidak



memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian Riau. Kasarnya, kita mencampakkan uang untuk memperbaiki kondisi buruk kita. Akibatnya seperti gili lobang tutup lobang.

Karena diamati dari sisi produksi perekonomian Riau terkontraksi hampir pada 17 sektor. Hanya 4 sektor yang pertumbuhannya positif. Sektor-sektor dominan dan berkaitan dengan perekonomian masyarakat untuk pertama kalinya sejak tahun 2001 terkontraksi atau tumbuh negatif. Sektor Pertanian terkontraksi menjadi *minus 0,94 persen* dan Industri Pengolahan terkontraksi *minus 1,19 persen* padahal kedua sektor ini lah yang mendominasi perekonomian Riau. Parahnya lagi di sektor perdagangan besar dan eceran pertumbuhannya juga mengalami kontraksi sebesar *minus 14,72 persen*. Sektor-sektor tersier yang selama ini mulai menggeliat dalam perekonomian Riau tidak luput dari terpaan bencana Covid 19 ini sehingga kini menjadi rontok semuanya.

Jika pun bencana Covid 19 ini mampu diatasi dan berakhir paling cepat bulan Juli 2020 mendatang maka tekanan terhadap perekonomian Riau tentunya akan semakin terasa dan kinerja ekonomi pasti akan semakin terpuruk. Termasuk periode untuk *me-recovery*-nya akan semakin sulit. Untuk itu pemerintah Riau seharusnya sudah mulai melakukan reorientasi kebijakan. *Pertama*, tentunya memetakan mana sektor ekonomi yang terdampak lebih dalam atau lebih sulit dan mana yang ringan. Selain itu harus diasesmen mana sektor yang membutuhkan jangka waktu lama dan mana yang lebih pendek. Lalu memetakan mana yang memiliki *multiplier effect* yang besar dan mana yang sifatnya lebih parsial. Paling penting adalah menentukan secara tepat masyarakat sasaran yang ada didalam setiap sektor yang benar-benar harus menjadi tanggungjawab pemerintah atau secara undang-undang memang harus menjadi beban pemerintah.

*Kedua*, memfokuskan pemanfaatan anggaran sebagai stimulus. Bukan bertindak sebagai “malaikat pemberi” dengan segala beban pencitraan yang ada di dalamnya. Perilaku ekonomi ke depan jika pandemi Covid 19 ini selesai akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Basis pergerakannya





sangat dipengaruhi oleh teknologi. Skill dan kemampuan memanfaatkan teknologi akan menjadi kekuatan utama untuk mampu tumbuh dan bertahan. Disektor pertanian sekalipun, basis teknologi informasi akan menjadi pilar utama dinamikanya. Apalagi disektor jasa dan perdagangan. Mungkin sudah saatnya tidak perlu membangun pasar atau *Mall* secara fisik untuk perdagangan sebab semua pasar dan *Mall* sudah ada dalam *Smartphone* masing-masing konsumen. Gudang dan jasa pengiriman dengan sendirinya akan menjadi basis penting untuk mendukung sistem perekonomian *virtual* di masa depan.

*Ketiga*, adalah membangun sinergi antar *stakeholder*. Pemerintah tidak bisa lagi menjadi penguasa dengan mengandalkan perundang-undangan yang mementingkan penguasa. Rakyat maupun Lembaga-lembaga ekonomi sudah akan membentuk jejaringnya sendiri dan setiap kebijakan pemerintah yang tidak produktif akan dimentahkan melalui sinergi dan kekuatan teknologi informasi. Perubahan yang terjadi sangat cepat dan berlangsung secara terus-menerus. Pemerintah harus berfungsi sebagai mitra pengatur yang aturan itu merupakan *resultan* dari semua kepentingan *stakeholder*. Disinilah diperlukan adanya sinergi sehingga produktivitas ekonomi dapat meningkat secara eksponensial.

*Keempat*, adalah keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif akan menjadi bahan olok-olokan masyarakat jika dalam mengemban amanah tidak transparan dan akuntabel. Baik karena kecepatan data dan informasi sampai kepada masyarakat pada waktu yang bersamaan maupun akibat kalkulasi-kalkulasi dan perhitungan masyarakat yang lebih canggih metode dan formulasinya dari yang digunakan pemerintah tersebut. Untuk itu proses partisipasi rakyat harus digerakan dan menjadi mutlak adanya dalam setiap pengambilan keputusan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Egal kelompok, kesamaan latar belakang, dan perkongsian kampung akan menjadi basis karena orang akan lebih fokus pada perkongsian kepentingan untuk saling membahagiakan. Era revolusi industri 4.0 ke depan seterusnya semakin mengalami percepatan implementasinya sebagai



konsekuensi dari dampak Covid 19 ini. Sangat diperlukan perubahan cara berfikir yang dengan terpaksa harus mampu beradaptasi dengan cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi. Orang-orang secara sosial akan makin berfikir positif untuk bersama saling menyejahterakan demi kepentingan bersama yang lebih baik dan lebih luas. Intrik-intrik hanya akan menjadikan seseorang terisolasi dalam ketertinggalan. Manusia tidak mungkin *survive* tanpa bermitra dengan manusia lain secara inovatif, terbuka, jujur, santabel, dan tentunya dengan jujur. *Ontablab....!!!*

\*\*\*\*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Menjadi ironis bila kota seperti Dumai tidak memiliki kekuatan dan kepemilikan dari setiap pelabuhan yang ada di wilayahnya dan menjadi aneh bila jalan-jalan antar kabupaten masih bersibah lumpur.



# STRATEGI PENGUATAN EKONOMI RAKYAT RIAU

Kinerja ekonomi Riau tahun 2012 relatif stabil dan bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Tanpa Migas sampai Triwulan III pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 8,26 persen. Sebuah performa yang sebenarnya sangat signifikan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan rakyat. Walaupun kontribusi sektor pertanian masih relatif besar namun geliatnya pun rendah, yakni hanya 1,73 persen. Berbeda halnya dengan pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tumbuh mencapai 17,78 persen. Termasuk sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga tumbuh mencapai 17,32 persen.

Fenomena tersebut memang sejak dulu melekat dalam struktur perekonomian Riau dimana sektor-sektor sekunder dan tersier dengan peran yang masih relatif kecil menggeliat secara spektakuler sedangkan sektor-sektor primer yang berkontribusi dominan pertumbuhannya relatif kecil. Sayangnya pada sektor primer inilah konsentrasi mata pencaharian rakyat terpusat dan mereka pada umumnya bermukim di pedesaan. Ini berarti tantangan strategis perekonomian rakyat Riau terletak pada bagaimana meningkatkan nilai tambah sektor primer, khususnya pertanian dan perkebunan dan menempatkan masyarakat penghasil komoditas primer tersebut sebagai penikmat yang nyata rente ekonomi yang dihasilkan.

Selama ini petani mendapatkan sedikit sekali nilai tambah ekonomi dari komoditas sektor primer, seperti hasil-hasil perkebunan (khususnya



sawit) maupun untuk komoditas pertambangan dan pertanian tanaman pangan. Di sub-sektor perkebunan petani dihadapkan pada struktur pasar yang lemah dengan pengendalian harga terencana. Mungkin pemerintah berniat mengendalikan harga agar tidak merugikan petani dengan rapat-rapat penentuan harga yang diadakan setiap minggu. Namun sebenarnya para oligopsonis komoditas perkebunan seakan mendapat legitimasi dari pemerintah dalam mengendalikan harga pembelian TBS melalui variabel-variabel penetapan harga yang mereka sepakati. Adanya penetapan harga tersebut membuat mereka sangat nyaman menikmati keuntungan yang sangat timpang antara petani dengan mereka. Variabel-variabel lain yang justru dapat menggeser rente ekonomi dari mereka kepada petani justru malah terabaikan untuk diakomodir dalam formulasi penetapan harga.

Dampak yang muncul dari mekanisme perdagangan seperti itu adalah semakin menaikkan posisi tawar petani. Belum lagi tekanan inflasi yang senantiasa menggerogotinya. Saat ini di Riau tingkat inflasi masih sangat tinggi yakni sekitar 4,09 persen dan di pedesaan mencapai 3,96 persen. Akibatnya, nilai tukar petani (NTP) masih rendah dan cenderung menurun sejak pertengahan 2012 lalu. Pada bulan Oktober 2012 nilai tukar petani adalah sebesar 103,79 sedangkan pada bulan Januari 2013 turun menjadi 102,42 persen.

Secara makro perekonomian rakyat di pedesaan Riau masih akan didera oleh belum akan membaiknya pasar global. Hal ini ditandai oleh masih seretnya pasaran ekspor komoditas unggulan Riau, yakni lemak dan minyak nabati yang memberi kontribusi ekspor mencapai 66,16 persen. Ekspor non migas Riau secara keseluruhan mengalami penurunan sampai 5,38 persen. Keadaan ini tentu akan menjadi variabel pula bagi eksportir untuk menentukan harga dan kuota pembelian CPO yang pada akhirnya akan menekan posisi bersaing para petani. Mengingat pasar ekspor komoditas tersebut didominasi oleh China dan India dan dalam bentuk barang setengah jadi, dimana negara-negara tujuan ekspor tersebut juga tergantung dari dinamika pasar Eropa dan Amerika, maka kinerja ekspor



pada tahun 2013 diprediksi tidak akan banyak mengalami kemajuan.

Ke depan, upaya strategis pembangunan perekonomian rakyat dengan sendirinya tidak dapat diletakkan pada isu-isu hilir yang lepas dari penanganan ketahanan ekonomi di sektor hulunya. Dentuman-dentuman kegiatan di sektor hilir yang lebih bersifat bias perkotaan (urban bias) justru hanya akan makin melemahkan posisi petani yang merupakan sebagian besar penduduk Riau yang seharusnya diberdayakan. Secara filosofis, pendekatan ekonomi kapitalis tak terkendali justru semakin memberi peluang pada para pemburu rente untuk memainkan taktik *kick and run* sehingga investasi permanen dan jangka panjang yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tidak terbentuk. Para pemilik modal semakinasyik berspekulasi pada even-even sesaat dengan keuntungan yang berlipat ganda. Itu semua sangat jauh dari harapan masyarakat petani dikekang oleh keterbatasan infrastruktur, cekikan struktur pasar dan jeratan inflasi berkepanjangan.

Inflasi yang terjadi justru sangat ironis dengan tingkat yang lebih tinggi berada di pedesaan dan bersumber dari keterbatasan suplai barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras, cabe, bawang, telur ayam, daging sapi, nasi dan kue-kue. Bukan kah komoditas tersebut justru seharusnya dihasilkan oleh para petani dan mereka seharusnya terlepas dari cengkraman harga penjual karena konsumsi mereka dapat diatasi dengan produksi sendiri. Keadaan ini seperti memberi gambaran betapa strategi pembangunan ekonomi rakyat di Riau yang selama ini diperbuat para pengambil keputusan kurang berkesesuaian dengan apa yang seharusnya di implementasikan bagi kemajuan masyarakat pedesaan Riau.

Isu peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau harus diletakkan pada kerangka persoalan utama yang saat ini membelit rakyat. Jantung persoalan utamanya adalah ketimpangan penguasaan aset ekonomi, khususnya lahan dan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus sekuat tenaga mengembalikan fungsi-fungsi lahan yang adil kepada rakyat. Baik fungsi secara kultural maupun secara struktural. Bila sebelumnya rakyat memiliki kearifan lokal dalam mengekstraksi sumberdaya alam maka



keberadaan itu harus dipulihkan seandainya saat ini telah digerus oleh nafsu-nafsu menimbun kekayaan. Dalam hal keuangan daerah yang sejak otonomi daerah diterima secara berlimpah harus pula digunakan secara optimal. Langkah-langkah menentukan prioritas atas dasar kebutuhan harus dipegang teguh sehingga mengumbar anggaran daerah hanya atas dasar keinginan belaka dapat dikemudikan. Baik di provinsi maupun kabupaten kota di Riau hasrat-hasrat menggelontorkan uang rakyat untuk kepentingan pelayanan aparatur harus diminimalisir sedemikian rupa sehingga setiap rupiah yang diperoleh dari pengurusan sumber daya alam di Riau dapat dimanfaatkan seefektif dan efisien mungkin bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan kedua adalah kualitas kelembagaan ekonomi rakyat yang dari aspek skala masih relatif kecil dan kurang profesional. Rakyat tidak dapat bergantung banyak pada koperasi yang memang secara kelembagaan belum mampu menaikkan posisi mereka. Paling banter keberadaan koperasi hanya berkutat pada penyediaan kebutuhan pokok yang juga bergantung pada pemburu rente ekonomi lain di atasnya. Dukungan permodalan masih pada sektor-sektor kecil dan mendompleng pada usaha-usaha induk. Koperasi masyarakat petani sawit masih berada dalam kendali perusahaan inti, demikian pola koperasi-koperasi lainnya. Usaha ekonomi lain belum menemukan formatnya untuk mampu menguasai sumberdaya ekonomi yang lebih profitable, baik karena faktor keberanian berusaha yang masih rendah maupun karena profesionalisme yang masih rendah.

Ketiga, berkenaan dengan sistem ekonomi. Pejabat pemerintah di Indonesia belum ada yang berani menerapkan sistem ekonomi rakyat yang benar-benar berpihak dan menjadi milik rakyat. Aturan kepemilikan saham dan sumber daya ekonomi masih sangat longgar dan menguntungkan pihak kaya. Nilai tambah ekonomi kian terpusat pada mereka dan kurang mengalir pada masyarakat miskin. Kepemilikan saham masih atas dasar kemampuan seseorang menyetorkan dana untuk investasi, nilai-nilai dan goodwill masih dianggap sebagai pelengkap. Bahkan kepemilikan sumber



daya utama, seperti tanah dianggap sebagai komoditas sehingga tidak ditempatkan sebagai kontribusi kepemilikan. Oleh karenanya maka tanah-tanah rakyat diganti rugi dan menghilangkan hak-hak kepemilikannya. Padahal seharusnya ia dinilai sebagai keikutsertaan pemilikan sehingga masyarakat memiliki suara terhadap sebuah entitas usaha yang tumbuh dan berkembang diwilayahnya.

Terakhir, guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang ada selama ini tantangan strategisnya juga harus mengedepankan keterkaitan antar wilayah. Riau pada dasarnya terbagi dalam dua karakteristik wilayah utama, yakni pesisir dan daratan pedalaman. Gerbang keluar harus diletakkan pada wilayah pesisir dan dukungan sumber-sumber ada diwilayah daratan. Industri berorientasi ekspor diletakkan pada wilayah pesisir sedangkan substitusi impor bermukim di daratan. Infrastruktur pelabuhan harus dibangun sebaik mungkin sementara jalur-jalur transportasi darat harus mampu menjembatani kedua wilayah tersebut. Menjadi ironis bila kota seperti Dumai tidak memiliki kekuatan dan kepemilikan dari setiap pelabuhan yang ada diwilayahnya dan menjadi aneh bila jalan-jalan antar kabupaten masih bersimbah lumpur. Riau harus merangkul semua potensi yang ada untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya, bukan mendedahkan potensi itu untuk dihisap kaum kapitalis borjuis yang kian terlena dengan kemewahan dan nafsu serakahnya. Semoga...!!!

\*\*\*\*\*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

**Membangun kemandirian tidak mungkin berhasil dengan mengandalkan bantuan sosial yang masif dan tak terukur. Itu hanya akan membuat rakyat menjadi peminta-minta dan sungguh nista. Hanya tiga yang utama untuk diupayakan bagi mengubah potret pilu masyarakat apatis tersebut oleh pemerintah.**





# STRATEGI EKONOMI GOTAH LANTUAK

Kehidupan perekonomian masyarakat saat ini telah sangat rentan terhadap berbagai guncangan dan krisis. Putus saja jalan dari Sumatera Barat atau Sumatera Utara harga-harga kebutuhan pokok langsung melonjak dan rakyat menjerit untuk membeli cabe, bawang dan segala macam keperluan pengganjal perut. Dari sisi pendapatan, turunnya harga CPO dan karet di pasar internasional langsung berkontribusi pada memucutnya daya beli masyarakat. Bila kedua sisi tersebut terjadi bersamaan maka tingkat kesengsaraan kian tinggi.

Alternatif mata pencaharian untuk mengatasi surutnya pendapatan dari perkebunan sudah sulit dikembangkan. Pola perkebunan mono kultur membuat lahan-lahan kian sempit. Lahan pertanian tanaman pangan berganti fungsi jadi perkebunan. Hutan-hutan yang dulu menjadi sumber penghasilan alternatif kini tinggal padang sawit yang tak memiliki ragam pemanfaatan. Mungkin peternakan masih dapat dikembangkan dicelah-celah jejeran pohon sawit dan tersedianya pakan ternak dari daun dan pelepah sawit. Hanya saja teknologi peternakannya sangat jauh dari budaya beternak orang-orang kampung.

Perubahan pendapatan dari berkebun sawit memang terasa meningkatkan kesejahteraan pada satu sisi, namun disisi lain meningkatnya pendapatan membawa dampak pada peningkatan pola konsumsi. Kecenderungan untuk membelanjakan uang memang sangat menggoa. Itu menjadi celah bagi para tengkulak untuk masuk dengan



menawarkan berbagai barang-barang pemuas hasrat, bukannya barang-barang kebutuhan pokok utama. Pola penjualan yang ditawarkan lebih banyak berbasis kredit. Masyarakat terjerat pada harga beli yang mahal dan terperangkap pada beban bunga yang relatif tinggi. Meskipun dengan uang muka yang rendah, bahkan dapat pula tanpa uang muka, hasrat masyarakat petani untuk memiliki, TV, sepeda motor, dan barang-barang belanjaan lain terpenuhi dengan tanggungan biaya yang relatif tinggi.

Terdapat kenaikan pendapatan masyarakat petani justru melupakan pula kebiasaan mereka untuk hidup dengan cara *self-service*. Lahan pangan dan lahan pekarangan yang selama ini digarap untuk memenuhi kebutuhan pokok sendiri terabaikan. Tidak sedikit lahan kosong dan terlantar yang dulunya berfungsi sebagai ladang padi dan jagung sekarang menjadi semak belukar tanpa isi. Lahan-lahan pekarangan dan kebun sayur-sayuran tidak diolah seperti sedia kala. Sebelumnya lahan-lahan tersebut berisikan ubi kayu dan segala macam *barang muda* (tanaman yang dapat dipanen dalam jangka pendek) untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bahkan hasilnya dapat dijual dipasar untuk memperoleh pendapatan tambahan bagi memenuhi keperluan hidup sehari-hari seperti garam, gula, teh, kopi, dan lain-lain. Kini semua keperluan hidup tersebut didapatkan dengan membelanjakan pendapatan dari sumber mata pencaharian pokok, yakni perkebunan sawit dan karet.

Dalam perspektif ini ternyata pertambahan pendapatan dari perkebunan sawit diiringi oleh petambahan pengeluaran hidup yang lebih besar. Berarti kehidupan petani sawit dan karet dicengkeram dilema ekonomi yang sangat klasik, yakni inefisiensi. *Marginal revenue* justru lebih kecil dari *marginal cost* sehingga terjadi kerugian ekonomi secara umum. Pada bagian akhir dari kondisi ini akan menimbulkan stress hidup yang berkepanjangan. Lilitan hutang-piutang masyarakat dan kian membuncungnya harga-harga kebutuhan pokok menyebabkan tensi dinamika kehidupan kian tinggi dan memanas. Rakyat akan gampang terprovokasi oleh isu-isu yang dihembuskan oleh berbagai pihak dan tidak jarang bertindak gegabah serta tanpa perhitungan.



Kondisi tersebut ditopang pula oleh terbatasnya alternatif memperoleh pendapatan sehingga seperti kehilangan akal untuk menutupi segala beban kehidupan yang kian menghimpit. Diperparah pula oleh cepatnya pergerakan informasi dan telekomunikasi yang menawarkan segala ketidakberesan hidup serta lemahnya peran dan hasil-hasil penguatan mental dan keagamaan maka suasana kehidupan masyarakat tak akan gelembung yang menunggu pecah menjadi kerusuhan. Yang pasti bila kesadaran baru akan muncul bila segalanya telah luluh lulut oleh kelalaian sendiri. Para tengkulak, rentenir dan orang-orang keruhannya akan berpura-pura simpati dan menawarkan berbagai strategi baru untuk tetap menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dan tergantung.

Tidak mudah untuk lepas dari jerat kehidupan ekonomi yang lebih memampakkan ciri ketergantungan dimaksud. Rakyat akan sulit untuk tidak menabung ketika terjadi peningkatan pendapatan tetapi dalam suasana pengeluaran yang juga bertambah lebih besar. Merupakan pekerjaan besar dan serius untuk menimbulkan kesadaran rakyat agar mereka mau bersusah payah memenuhi keperluannya sehari-hari ketika mereka sedang merasa nikmat membelanjakan kenaikan pendapatan. Membalikkan keadaan dari *buying action ke self service* kembali merupakan tantangan yang tidak kecil. Pemerintah dan para penggiat yang peduli dengan betapa buruknya situasi ini tentunya harus mencari resep yang mujarab untuk mengubahnya. Titik sentuh agar semua terurai lembut dan tidak menimbulkan ledakan kesengsaraan harus ditemukan. Kaum terdidik jangan sampai justru terbuai untuk larut dalam dinamika tersebut dan bahkan ikut serta bermain-main untuk “menangguk di air keruh”, khususnya para politikus dan birokrat karbitan. Risiko dan biayanya akan sangat mahal untuk sebuah keberhasilan melaksanakan pembangunan.

Strategi pembangunan yang berorientasi pada efisiensi ekonomi dan perbaikan taraf hidup masyarakat memang membutuhkan waktu. Pemerintah harus bersedia untuk tidak populer dimata masyarakat bila ingin menempatkan langkah-langkah logis kepada penyelesaian



2. Dianggap mengunutkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

yang fundamental. Berat memang menciptakan suatu situasi dimana masyarakat memiliki beragam sumber pendapatan. Jumlah penduduk kian membengkak, lahan kian terbatas, ragam keinginan makin bertambah sehingga solusi komprehensif sulit ditemukan. Kian banyak kepala kian banyak pula hasrat dan keinginannya.

Pembangunan tentunya tidak dapat diarahkan untuk mengurangi pendapatan. Justru sebaliknya peningkatan pendapatan harus senantiasa ditumbuhkan. Namun demikian meredam kenaikan pengeluaran dari kenaikan pendapatan menjadi penting untuk dikerjakan. Masyarakat harus tetap ditumbuhkan kesadarannya untuk mengendalikan hasrat belanja yang tidak produktif. Ini berarti celah-celah investasi produktif rakyat harus dibuka oleh pemerintah. Disinilah peran APBD yang sesungguhnya dalam menumbuhkan kreativitas dan produktivitas masyarakat. Anggaran pemerintah harus mampu menstimulus lahirnya peluang-peluang masyarakat untuk menciptakan berbagai alternatif pendapatan dan mengurangi beban hidup.

Kemandirian rakyat merupakan kunci utama bagi kesuksesan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Kemandirian bukan berarti semata-mata dalam aspek ekonomi tetapi juga meliputi aspek integritas dan aktualitas rakyat untuk menjadi dirinya sendiri. Dahulu kala, meski pun hidup di pedesaan, rakyat terkesan sangat mandiri. Di Kuantan Singingi misalnya, sangat terkenal dengan istilah *gotah lantuak*. Penyadap karet tak akan menjual getah hasil sadapannya bila harga kurang bersahabat. Getah yang sudah disadap akan ditumpuk (dilantuak) menunggu harga bagus atau dijual bila memang ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dan mendesak. Mereka seakan tak hirau dengan tekanan toke dan aparat pemerintah karena mereka memiliki berbagai alternatif mata pencaharian. Musim dan cuaca menjadi sesuatu yang silih berganti tanpa heboh dan tak perlu dirisaukan. Setiap musim mereka memiliki cara memenuhi segala kebutuhan pokoknya dan setiap waktu mereka punya kemampuan mendapatkan segala kebutuhan hidupnya.

Menghadapi krisis ekonomi rakyat tak gentar. Harapan tetap



mereka bergantung untuk nuansa kehidupan yang kian membaik, tetapi mereka punya kesadaran dan kebiasaan untuk hidup dalam kewajaran. Dolar naik dan inflasi membumbung bagi mereka justru hanya sebuah nyanyian kehidupan. Kemana melangkah ada sumber kehidupan dan hasrat berbandulkan kepatutan sehingga tidak terjerat nafsu keserakahan. Hata kekacaban dirajut untuk meninggikan yang patut berdiri tegak dan menyelesaikan yang mesti harus duduk bersimpai sila. Institusi kemasyarakatan, mulai dari sosial dan ekonomi terhindar dari praktik pemburu rente yang kemaruk dan memecah belah.

Membangun kemandirian tidak mungkin berhasil dengan mengandalkan bantuan sosial yang masif dan tak terukur. Itu hanya akan membuat rakyat menjadi peminta-minta dan sungguh nista. Hanya tiga yang utama untuk diupayakan bagi mengubah potret pilu masyarakat apatis tersebut oleh pemerintah. Pertama, cukupi kebutuhan infrastruktur dasar rakyat agar mereka mampu mengupayakan kecukupan hidup mereka dan menurunkan beban kehidupannya. Kedua, perbaiki kualitasnya, baik dari segi keterampilan dan pengetahuan serta kesehatannya. Ini penting karena waktu tak mungkin berhenti berputar, apa lagi balik ke belakang. Rakyat harus siap menghadapi perubahan dengan segala kepekaan dan kecakapan. Ketiga perkuat benteng pertahanan jiwanya. Ini memerlukan perbaikan yang terus menerus dalam keimanan dan ketaqwaannya pada Tuhan Yang Esa. Inshaallah...!

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dianggap mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



**Produktivitas semua anggota rumah tangga harus  
dirangsang supaya paling tidak untuk menghasilkan sendiri  
segala kebutuhan sehari-hari rumah tangga.  
Jangan sampai membeli sayur ditengah-tengah  
lahan tertinggal yang dapat ditanam sayur.**





## RIAU DALAM GELIAT SUKU BUNGA THE FED

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

*Federal Reserve* memangkas suku bunga. Ini untuk yang ketiga kalinya tahun 2019. Sejak Oktober kemaren suku bunga Bank Sentral Amerika itu dipangkas sebesar 25 basis points menjadi hanya 1,50-1,75 persen. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global yang berdampak negatif terhadap perekonomian dalam negeri Amerika. Donald Trump masih meradang dengan penurunan sebesar itu. Dia ingin suku bunga *The Fed* mencapai titik nol atau bahkan negatif. Ini tentu berkait dengan kepentingan kampanyenya untuk kembali menduduki singgasana presiden pada pemilu yang akan datang sasarannya adalah angkatan kerja yang kian bertambah jumlahnya sementara kesempatan kerja tidak banyak berkembang. Bila pengangguran meningkat maka kesempatan untuk meraup suara dari para pekerja akan berkurang dan pengangguran akan menjadi isu politik yang seksi dalam kampanye lawan.

Dalam pandangan Gubernur *The Fed* penurunan sebesar itu sudah merupakan kebijakan yang ideal untuk mengantisipasi adanya pengaruh buruk dinamika ekonomi global yang memang kian melambat. Pertumbuhan ekonomi Amerika masih mampu dipertahankan walaupun secara global ekonomi melambat. Saat ini perekonomian Amerika masih mampu bertahan pada level 1,9 persen walaupun jauh lebih rendah dari keinginan presiden yang menggadang-gadang perekonomian mampu bergerak pada kisaran pertumbuhan sebesar 3 persen. Ekspansi ekonomi yang terlalu jauh menurutnya justru akan membuat daya tahan ekonomi



dalam negeri rentan dari tekanan eksternal. Koreksi suku bunga sebesar itu sudah sangat memadai bagi mempertahankan pertumbuhan dan menampilkan risiko perlambatan ekonomi global. Saat ini ada momentum membaik yang dapat menjadi alasan seperti mulai adanya tanda-tanda resolusi perang dagang Amerika dan China, angka inflasi yang relatif terjaga pada kisaran 2 persen, dan perekonomian masih tumbuh pada tingkat pertumbuhan 1,9 persen.

Dari respon *The Fed* terhadap perekonomian global tentu perlu ada yang dicermati oleh Riau sebagai intensitas ekonomi yang sangat rentan terhadap perkembangan ekonomi global. Jangan sampai reaksi ekonomi saat diterjemahkan dalam kebijakan skala panjang dan luas. Pergerakan ekonomi pada tataran global masih mengandung ketidakpastian yang tinggi. Harga tandan buah segar sawit saat ini memang telah menaik. Pendapatan petani tentu mengalami peningkatan. Biasanya perekonomian Riau akan menggeliat sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga petani sawit. Hilirnya adalah inflasi dan menghangatnya tensi perekonomian. Konsekwensinya adalah kembalinya pergerakan pada arah yang negatif. Oleh karena itu manajemen cashflow rumah petani sawit seharusnya dapat ditata untuk menjaga momentum positif berlangsung lebih lama.

Perekonomian Riau pada Triwulan III 2019 ini menggeliat cukup bagus. Dibandingkan dengan Triwulan II 2019 pertumbuhannya lebih tinggi yakni sebesar 4,16 persen dengan migas dan 5,82 persen tanpa migas. Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya maka pada Triwulan III 2019 ini maka PDRB Riau dengan migas mampu tumbuh sebesar 2,74 persen dan tanpa migas sebesar 5,22 persen. Sektor yang menonjol jika dilihat secara triwulan adalah Usaha Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 10,6 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,29 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 6,65 persen. Secara tahunan pada Triwulan III 2019 sektor yang menonjol adalah Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 18,35 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,65 persen, dan Informasi





dan Komunikasi sebesar 10,83 persen.

Melihat kecenderungan perkembangan PDRB tersebut maka Riau dengan sendirinya akan berhadapan dengan pengaruh global yang sangat peka. Setahun terakhir perekonomian banyak didominasi pertumbuhannya oleh sektor-sektor konsumtif yang berkaitan erat dengan dinamika global atau paling tidak berskala nasional dan regional. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengemuka sejalan dengan berkembangnya rumah sakit swasta dan menjamurnya klinik-klinik perawatan medis. Hal tersebut tentunya terkait dengan perkembangan pengadaan listrik dan gas dalam memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga ataupun usaha-usaha masyarakat. Menarik untuk dicermati adalah geliat sektor informasi dan komunikasi yang tentunya dipicu oleh membaiknya pendapatan rumah tangga petani, khususnya rumah tangga para pekebun sawit. Kenaikan harga TBS yang kini telah mencapai kisaran 45 persen akan memberi dampak pada menguatnya konsumsi rumah tangga. Pengaruhnya terhadap sektor-sektor ketiga terutama jasa-jasa akan meningkat.

eratnya kaitan ekonomi Riau dengan percaturan ekonomi global membuat perlunya kewaspadaan terhadap dinamika yang terjadi. Penurunan suku bunga The Fed dilakukan untuk mengantisipasi akan adanya krisis ekonomi pada tataran global. Ini berarti bagi Riau harus pula diantisipasi dampak-dampaknya, baik positif maupun negatif. Melemahnya rupiah (jika faktor lain tidak berubah) biasanya akan menaikkan harga TBS karena harga di pasaran ekspor dalam dollar akan lebih murah dan daya saing meningkat. Mendapatkan sedikit dolar akan memperoleh rupiah lebih banyak sehingga mampu membeli dalam rupiah yang lebih banyak. Namun bila gejala pasar membuat permintaan jadi terkoreksi maka harga dapat langsung anjlok sehingga para petani sawit akan kelirangan permintaan produk dan pendapatan secara mendadak menjadi turun.

Mengantisipasi gonjang-ganjing ekonomi global dan rentannya perekonomian Riau terhadap permasalahan tersebut baik pemerintah, pihak pengusaha dan masyarakat hendaklah mengantisipasinya dengan



pola-pola dan strategi tersendiri. Pemerintah melalui perangkat aparaturnya yang dimilikinya harus senantiasa mengarahkan kebijakan anggaran yang dapat menurunkan beban biaya rumah tangga rakyat. Caranya bukan dengan memberi subsidi yang konsumtif. Subsidi dapat diberikan melalui teknik produktif yang mendorong pengurangan konsumsi impor dan eksploitasi. Produsen dan masyarakat didorong untuk menciptakan produk-produk substitusi impor atau bila memungkinkan menciptakan produksi yang sama dengan menggunakan komponen dalam negeri. Membangun infrastruktur yang mampu mengurangi komponen biaya produksi dan *delivery* sehingga harga jual oleh pemasok dapat diturunkan. Termasuk memangkas biaya-biaya siluman yang menyebabkan in-efisiensi ekonomi. Kepastian usaha dan kemudahan yang bertanggung jawab dalam investasi digalakkan agar barang-barang keperluan masyarakat dapat diproduksi dan lapangan pekerjaan tetap tumbuh sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Para pengusaha harus menengarai pergerakan ekonomi global tersebut dengan tetap memantau arah dan konsekuensi perilakunya. Kecanggihan teknologi yang semakin memudahkan komunikasi dan serapan informasi harus dimanfaatkan untuk menentukan langkah-langkah logis yang mesti dibuat. Jangan sampai terlambat bertindak dalam pergerakan perekonomian yang berubah cepat. Biaya yang tidak patut dibelanjakan harus dikikis untuk meningkatkan efisiensi usaha. Sinergi dibangun untuk membuat adanya tanggung renteng penanggulangan risiko dan memperoleh hasil yang lebih optimal. Biasakan melakukan inovasi atas skill dan ketekunan sendiri dari hasil observasi pasar yang lengkap dan memadai. Jangan mengecewakan konsumen dengan cara-cara bisnis yang kurang etis. Arus kepedulian konsumen melintas dengan cepat namun dapat dilunakkan dengan membangun kepercayaan melalui hubungan bisnis yang harmonis.

Bagi masyarakat sendiri dalam situasi perekonomian yang berfluktuasi yang paling penting diperhatikan adalah mengelola cashflow secara baik. Jangan sampai ketika uang masuk banyak pengeluaran semakin



dibengkalakan dan ketika uang masuk menyusut menjadi kelimpungan.

1. Perencanaan pengeluaran rumah tangga yang lebih terarah harus dibuat dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai seperti ada rasa malu untuk bekerja bersama dalam rumah tangga. Anak-anak seperti diamanjakan orang tua tanpa diajarkan hidup produktif dan ekonomis sejak dini. Menjadi malu menghasilkan uang dengan bekerja sejak muda. Padahal dari situ akan diperoleh dua manfaat utama dalam diri anak-anak, yaitu menghargai uang yang dimiliki dan berfikir produktif untuk mengurangi ketergantungan pada orang lain.

Produktivitas semua anggota rumah tangga harus dipupuk paling tidak untuk menghasilkan sendiri segala kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Jangan sampai membeli sayur ditengah-tengah lahan tertinggal yang dapat ditanam sayur. Beternak dua pasang ayam kampung sudah dapat memperoleh dua telur ayam setiap harinya dan itu mampu memberi sarapan bergizi untuk dua orang anak. Begitu banyak waktu yang tersisa, ruang yang tersedia dan pasar yang terbuka untuk sebuah kreativitas kecil yang mampu menyelesaikan banyak sumber masalah. Sebuah langkah kecil untuk menghasilkan sesuatu jauh lebih baik dari mendiskusikan sesuatu yang tidak menghasilkan sesuatu. Padahal kebutuhan akan sesuatu itu adalah sumber dari sesuatu yang tidak menentu bila tidak mampu memenuhi segala sesuatu. *Ontah lab.....!!!*

2. Dianggap mengunutkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



AKHIRNYA, RAMADHAN AKAN SEMAKIN BERMAKNA SECARA EKONOMI  
BILA Masing-masing UMAT MAMPU MECiptakan DIRI YANG  
TERKENDALI SECARA HORIZONTAL DAN TERARAH SECARA VERTIKAL UNTUK  
MENDAPATKAN KESEJAHTERAAN BERSAMA SECARA BERKELANJUTAN.



## GELIAT EKONOMI RAMADAN

Idenya dalam perspektif ekonomi, Ramadhan memberi dampak pada adanya pemerataan pendapatan. Bagi kaum miskin inilah saatnya menerima berkah dari datangnya bulan Ramadhan didalam kehidupan duniawi. Kelas menengah ke atas dengan memperbesar sedekah, zakat dan khususnya melalui zakat fitrah memberikan transfer pendapatan pada kaum miskin. Pada saat itu akan terjadi peningkatan permintaan atau konsumsi masyarakat miskin dari peningkatan pendapatan yang diterimanya. Sedekah dan zakat orang-orang “berada” secara ekonomi mampu mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat miskin. Jika masyarakat berpenghasilan menengah ke atas tersebut memegang teguh substansi Ramadhan maka pada dirinya akan terjadi pengurangan pola konsumsi sebagai konsekwensi dari pengendalian diri yang dilakukan selama Ramadhan. Oleh karenanya akan terjadi keadaan dimana konsumsi orang kaya menurun dan konsumsi orang miskin meningkat, sehingga secara ekonomi tidak perlu terjadi adanya lonjakan permintaan berbagai kebutuhan pokok yang berujung pada peningkatan harga-harga yang tak terkendali.

Islam memang secara sangat tegas tidak mentolerir adanya sikap konsumtif yang cenderung berlebih-lebihan, baik itu dibulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya. Allah SWT telah memperingatkannya di dalam Al Quran: “... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan



(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (QS. Al Isra:26-27). Ini berarti jika substansi pengendalian diri dalam Ramadhan dipegang teguh dan apa yang telah digariskan Allah SWT untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi maka geliat ekonomi Ramadhan hanya akan dominan muncul dalam aspek *consumption transfer* dengan penekanan pada pemerataan ekonomi. Disinilah letak hakiki dari Ramadan yang tertuju pada pemerataan kesejahteraan.

Lantas apa yang terjadi dilapangan? Teori kesejahteraan ekonomi yang ditanamkan oleh Ramadhan seperti terkikis oleh berbagai perilaku konsumtif masyarakat. Ternyata konsumsi masyarakat kaya tidak mengalami penurunan. Mereka justru cenderung kian terdorong untuk membelanjakan uangnya pada bulan ramadan sehingga meningkatkan permintaan akan barang-barang, baik makanan maupun pakaian dan segala perabotan rumah tangga lainnya. Akibat dorongan permintaan tersebut harga pun bergerak naik sehingga angka inflasi melonjak. Secara umum konsumsi masyarakat dalam bulan ramadan bisa meningkat 30 sampai dengan 40 persen. Biasanya penjualan konveksi dan makanan dapat meningkat sampai 30 persen, khususnya seminggu menjelang lebaran. Disisi lain peningkatan pendapatan yang terjadi pada kaum miskin juga menyebabkan naiknya permintaan sehingga daya dukung untuk kenaikan inflasi kian bertambah. Harga-harga pangan cenderung meningkat sebesar 15 sampai dengan 25 persen.

Pada akhirnya justru peningkatan pendapatan rakyat miskin justru tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga yang terjadi. Dalam aspek kesejahteraan dengan sendirinya tidak dapat dipastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat miskin. Bahkan mungkin justru mereka merasa kian terjepit oleh ulah para spekulan dan produsen, dengan berbagai inovasinya, mampu menciptakan pula dorongan baru bagi naiknya ekspektasi masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Keadaan ini kian diperburuk lagi oleh budaya mudik untuk memenuhi kerinduan berkumpul dengan sanak keluarga.





Sebaliknya bila mampu memanfaatkan situasi ekonomi pada saat Ramadan dengan berbagai kreativitas yang ada maka berkah ekonomi yang timbul selama Ramadhan juga sangat banyak. Tantangan kenaikan konsumsi masyarakat dapat diubah menjadi peluang untuk dimanfaatkan lagi peningkatan pendapatan. Pola konsumsi masyarakat yang muncul selama Ramadhan biasanya terjadi dalam tiga fase. Pada menjelang dan awal Ramadhan akan terjadi peningkatan konsumsi karena masyarakat memulai mempersiapkan berbagai hal dan menimbunnya guna menghadapi Ramadhan. Pada fase pertengahan Ramadhan biasanya kenaikan konsumsi agak mengendor. Barulah pada fase ketiga, yakni sekitar seminggu menjelang konsumsi akan meningkat kembali karena persiapan menghadapi Ramadhan. Pada fase ketiga ini biasanya masyarakat miskin juga akan meningkat konsumsinya karena tidak jarang kaum kaya menggelembungkan zakatnya pada hari-hari menjelang lebaran.

Namun demikian, bagi pedagang makanan atau ta'jil Ramadhan fase ketiga ini, khususnya di perkotaan akan mengalami penurunan konsumsi karena musim libur sekolah biasanya dimulai. Banyak anak-anak sekolah dan mahasiswa yang mudik ke kampung sehingga mulai terjadi penurunan konsumsi. Konsumsi masyarakat pun mulai beralih pada pemenuhan kebutuhan pangan untuk lebaran. Untuk itulah pola konsumsi ini perlu dibaca secara cermat agar para pedagang ta'jil Ramadhan yang menjamur di bulan Ramadhan tidak mengalami kerugian.

Lantas, upaya untuk semakin menunjukkan bukti bahwa geliat ekonomi Ramadhan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat perlu ditempuh beberapa hal. Pertama, pemerintah harus senantiasa mendorong terselenggaranya mekanisme perkonomian yang positif dengan menjaga kelancaran arus barang dan jasa. Inflasi sering dipicu oleh adanya para spekulan yang menimbun barang untuk memanfaatkan fluktuasi konsumsi masyarakat selama Ramadhan. Pemerintah harus mampu mencegah trik-trik para pemburu rente ini untuk “menangguk di air keruh” agar inflasi dapat diminimalkan.



*Ketika*, diberbagai kesempatan harus senantiasa didengarkan agar masyarakat bersedia mengubah pola dan budaya konsumtif yang terjadi pada diri mereka di bulan Ramadhan. Selain sudah keluar dari hakikat dan substansi Ramadhan itu sendiri konsumsi yang berlebih-lebihan tersebut justru dapat menimbulkan kesengsaraan ekonomi bagi masyarakat dalam jangka panjang. Semua unsur, baik pemerintah, ulama, dan para guru serta tokoh-tokoh masyarakat hendaknya mampu memberikan tausyiah dan teladan yang baik menyangkut pembudayaan ekonomi produktif selama bulan Ramadhan. Seharusnya Ramadhan menjadi ajang peningkatan komunikasi dengan Allah SWT melalui perbaikan empati dan kepedulian terhadap sesama. Tidak cukup hanya sekedar membayar zakat, infaq dan sedekah semata tanpa diikuti oleh empati untuk memberdayakan sesama umat. Pendekatannya haruslah berbasis perbaikan kesejahteraan bersama dalam jangka panjang. Bukan kah berpuasa menahan lapar dan hawa nafsu adalah ajang untuk ikut mengerti dan memahami hidup dalam kebersamaan yang lebih baik guna menciptakan masyarakat madani.

*Ketika*, berkah ekonomi Ramadhan yang timbul dari adanya transfer pendapatan hendaklah diarahkan pada peningkatan inovasi dan produktivitas. Dinamika ekonomi yang terjadi selama Ramadhan sangatlah cepat dan besar. Tidak hanya umat Islam yang menanggung rezeki pada bulan penuh berkah tersebut. Umat lainnya pun turut menikmatinya. Perlu terus diupayakan agar arus perekonomian tersebut berlangsung pada proses pembesaran keekonomian umat Islam bukannya kian mengalihkan aset ekonominya pada orang lain yang justru kian inovatif dan produktif dari membaca perilaku ekonomi Ramadhan. Buatlah sesuatu yang memberdayakan sesama dari peluang yang diberikan Allah SWT pada setiap bulan Ramadhan.

*Akhirnya*, Ramadhan akan semakin bermakna secara ekonomi bila masing-masing umat mampu menciptakan diri yang terkendali secara horizontal dan terarah secara vertikal untuk mendapatkan kesejahteraan bersama secara berkelanjutan. Bulan Ramadhan sebagai ajang pembelajaran dan bulan-bulan lainnya terimplementasi secara berkesinambungan.

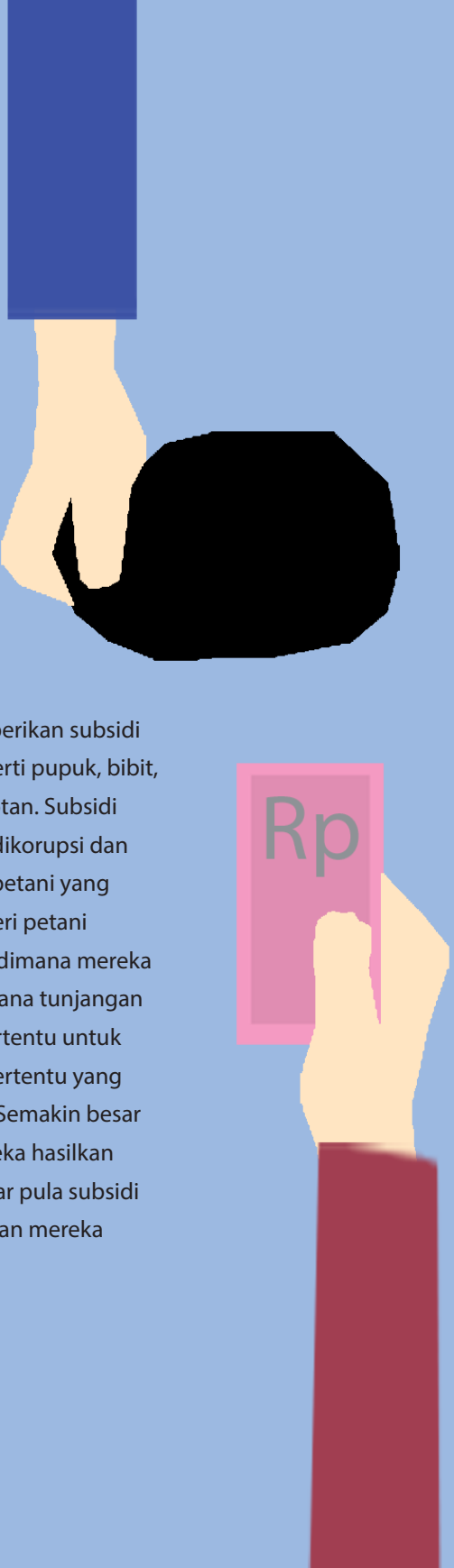




Budaya mudik yang selama ini belum optimal dimanfaatkan dapat lebih ditingkatkan efek positifnya untuk mengalirkan likuiditas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah atau daerah. Pemerintah harus mampu menciptakan saluran-saluran distribusi likuiditas ini, baik melalui pengembangan infrastrukturnya maupun pengembangan sikap mental masyarakatnya. Semoga...!

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





## MENSIASATI TEKANAN INFLASI DI RIAU

Memasuki akhir tahun 2013 inflasi di Riau melonjak tajam dari 6,69 persen pada triwulan kedua menjadi 7,74 persen pada triwulan ketiga. Inflasi dikategorikan menjadi tiga yakni, inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun, inflasi sedang antara 10%—30% setahun, inflasi berat antara 30%—100% setahun, dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Meski inflasi di Riau masih tergolong dalam kategori inflasi ringan, tekanannya terhadap kesejahteraan masyarakat tentunya amat terasa. Beban hidup kian menghimpit sementara pada satu sisi pendapatan tidak meningkat sejalan dengan kenaikan harga-harga berbagai kebutuhan pokok. Pada triwulan keempat memang mengindikasikan adanya perbaikan, namun intensitasnya tidak akan berbeda jauh.

Pemicu utama inflasi di Riau tentunya berawal dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada triwulan kedua 2013. Kenaikan BBM memaksa dilakukannya penyesuaian tarif angkutan dan pada gilirannya meningkatkan biaya transportasi bagi arus lalu-lintas barang dan orang. Konsekwensi akhirnya adalah naiknya harga barang-barang. Riau merupakan wilayah yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga barang-barang karena berbagai komoditas kebutuhan masyarakat di Riau sebagian besar diimpor, baik dari wilayah tetangga dan daerah Indonesia



lainnya maupun dari luar negeri. Itu pula sebabnya bila terjadi penguatan nilai dolar atau pelemahan nilai rupiah maka tingkat inflasi di Riau juga terdorong naik.

Tekanan inflasi semakin menyengat pada akhir triwulan ketiga 2013 ketika dihadapkan pada hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru sekolah. Dipicu oleh musim hujan dan banjir diberbagai wilayah Riau sehingga ketersediaan barang-barang kebutuhan menipis dan harga-harga pun kian melonjak. Dampaknya tetap terasa meskipun musim penghujan telah selesai. Kontur wilayah Riau berawa-rawa dan kondisi infrastruktur jalan kurang memadai menyebabkan ongkos transportasi kian membengkak sehingga harga jual berbagai komoditas sulit diturunkan.

Pada sisi produksi kemampuan Riau menyuplai kebutuhan pokok terganggu oleh faktor alam. Di musim hujan dihantam banjir sedangkan di musim kemarau diterpa jerabu dan asap. Berkurangnya kemampuan produksi menyebabkan ketergantungan terhadap impor membengkak dengan harga yang sangat labil. Belum lagi ulah dari para spekulan yang memanfaatkan situasi pasar untuk memperoleh rente yang lebih besar. Moral aparaturnya yang lemah menambah pula kisruhnya sistem perekonomian yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

Pada tahun 2014 tingkat inflasi masih akan sulit ditekan. Carut marut kebijakan energi yang terjadi di awal tahun tetap akan berdampak pada instabilitas harga. Kenaikan harga energi, termasuk gas elpiji sangat sensitif menimbulkan peningkatan harga-harga. Terkadang, walaupun keterkaitan jenis produk masih jauh dengan persoalan energi namun trik-trik para spekulan membuat harga-harga produk tersebut tetap ikut-ikutan terdorong naik. Diperlukan kebijakan komprehensif untuk menyiasati kenaikan inflasi ditahun-tahun mendatang. Secara makro iflasi dapat ditenggang melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan non-fiskal.

Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter. Instrumen yang digunakan dapat berupa



operasi pasar terbuka, *discount rate policy*, kebijakan cadangan wajib minimum, dan melalui kebijakan kredit selektif. Pada tataran fiskal pemerintah dapat pula mengambil kebijakan melalui peningkatan pajak, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan mengadakan pinjaman pemerintah. Pilihan-pilihan kebijakan akan tergantung pada situasi dan kadar inflasi itu sendiri.

Pemerintah dalam mengelola perekonomian negara tentunya memperhatikan secara cermat berbagai faktor dan dampak sebuah kebijakan. Untuk itulah, selain mengedepankan kebijakan moneter dan fiskal maka kebijakan non-fiskal juga dapat ditempuh, seperti meningkatkan produksi. Pemerintah membantu dan mendorong para pengusaha untuk menaikkan atau meningkatkan produksinya, diharapkan dengan meningkatnya produksi akan menghasilkan output yang lebih banyak, dengan output yang beredar dipasaran lebih banyak maka harga diharapkan akan turun sehingga inflasi dapat diatasi.

Membaca situasi inflasi di Riau memang lah tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi yang parah, apa lagi sangat parah. Hal yang perlu dicermati adalah peningkatan inflasi yang cukup signifikan dan sangat sensitif terhadap faktor-faktor eksternal ekonomi. Kebijakan dan program ekonomi daerah dapat menjadi kurang bermakna dari aspek manfaat akibat lonjakan-lonjakan inflasi yang tak dapat diperkirakan. Selain itu, upaya mengendalikan inflasi masih bergantung pada hasil kebijakan pusat sehingga pendekatan-pendekatan kewilayahan belum diformulasikan secara optimal.

Inflasi sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Bagi kalangan elit kenaikan harga barang mungkin tidak berakibat pada pengurangan konsumsi. Bahkan mungkin tak bergigit terasa dampaknya pada alokasi pendapatan untuk kebutuhan konsumsi. Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu menaikkan pendapatan dampaknya akan beruntun. Daya beli menjadi turun karena kenaikan harga tidak mampu diatasi dengan kenaikan alokasi belanja. Bila sebelumnya mampu membeli dua kilogram beras dengan uang yang



Dukungan kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan pemerintah pusat oleh daerah dalam menjaga stabilitas inflasi akan banyak terfokus pada kebijakan non-fiskal. Menjaga kelancaran arus barang dan jasa sangat urgen dilakukan. Untuk itulah fokus pembangunan infrastruktur harus lebih banyak diarahkan pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi. Harga-harga barang sangat tinggi di Riau karena ongkos angkut ke dan di Riau sangat mahal. Jarak tempuh yang pendek dilalui dengan waktu tempuh yang lama sehingga pemborosan sangat tinggi. Ongkos bongkar muat yang tinggi dan tidak terstandar juga sangat membebani para pengusaha yang pada akhirnya berujung pada mahalnya harga jual.

Pengendalian ekonomi biaya tinggi juga menjadi penyebab harga-harga sulit diturunkan oleh para penjual. Jalan-jalan di Riau penuh dengan kutipan-kutipan, baik resmi maupun siluman. Berbagai elemen atas nama pembangunan daerah maupun atas kehendak pribadi menjadikan lalu-lintas kendaraan sebagai sumber “mencakuak” uang. Bila kondisi ini bisa dieliminasi maka penurunan harga barang dipasaran bukan tidak mungkin bisa direalisasikan. Belum lagi toko-toko yang begitu banyak kutipan uang oleh berbagai oknum yang ke semuanya harus didistribusikan kedalam harga jual barang.

Pada sisi suplai barang Riau harus meramu kebijakan yang dapat meningkatkan produksi berbagai bahan pangan utama maupun alternatif. Ketersediaan lahan masih mencukupi untuk meningkatkan



produksi beras, jagung, sayur mayur dan buah-buahan. Perkebunan sawit dan karet dijadikan sebagai sumber ekonomi utama keluarga namun pertanian tanaman pangan dijadikan strategi mengurangi pengeluaran. Naiknya suplai secara otomatis akan menurunkan harga. Mengurangi ketergantungan bahan pangan dari luar merupakan solusi yang strategis tidak hanya bagi pengendalian inflasi tetapi juga dapat dijadikan kebijakan mengurangi kemiskinan.

Adapun baiknya dana-dana bansos dan rekomendasi DPRD yang saat ini membekali APBD dijadikan subsidi produktif bagi para petani Riau yang mampu menghasilkan beras, jagung, cabe, bawang dan komoditas pangan lainnya yang urgen dibutuhkan rakyat. Setiap kilogram beras dan berbagai komoditas yang dihasilkan oleh rakyat diberikan insentif tertentu sehingga masyarakat petani menjadi kian produktif dan tak takut akan penurunan harga. Subsidi produktif petani seperti ini lazim dilakukan di Eropa dan Amerika sehingga daya saing dan produktivitas mereka senantiasa meningkat. Petani jangan diberikan subsidi dari sisi hulu, seperti pupuk, bibit, saprodi dan saprotan. Subsidi ini sangat rawan dikorupsi dan tak sampai pada petani yang sesungguhnya. Beri petani subsidi di sisi hilir dimana mereka akan mendapat dana tunjangan dalam besaran tertentu untuk setiap kuantitas tertentu yang mereka hasilkan. Semakin besar output yang mereka hasilkan maka semakin besar pula subsidi produktif yang akan mereka dapatkan. Manfaat ekonomi, politik dan kesejahteraan sosialnya akan lebih terasa. Semoga...!

\*\*\*\*\*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

**Akhirnya, dengan begitu besarnya sisa lebih anggaran setiap tahunnya, membengkaknya anggaran untuk kepentingan aparatur, menjadi-jadinya dana aspirasi dan bantuan sosial serta begitu lambatnya perumusan dan realisasi anggaran, masih dapatkan kita berhadapan pada anggaran APBD Riau untuk menjadi alat memotivasi masyarakat membangun kekuatan dirinya menghadapi tantangan hari esok yang tak kian mengecil ?**



## KISRAH APBD RIAU

Namun kepentingan nampaknya masih sangat mengemuka dalam proses pengesahan APBD Riau. Eksekutif menunjukkan dominansinya melalui penyusunan anggaran berdasarkan usulan satuan kerja pemerintah daerah dan urusan-urusan yang harus diselenggarakannya sebagai pelaksanaan amanat rakyat. Sementara DPRD menunjukkan “taringnya” melalui hak budget yang dimilikinya atas nama aspirasi masyarakat. Entah mana yang paling pantas disebut sebagai pejuang kepentingan rakyat dan entah mana pula yang pantas dipandang sebagai “meniti” di atas kepentingan masyarakat.

Untuk tahun 2014 sebagaimana diajukan dalam dalam rancangan APBD oleh pemerintah provinsi Riau ke DPRD diproyeksikan total pendapatan daerah akan mencapai Rp7,119 triliun rupiah. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,840 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp3,638 triliun. Sisanya sebesar Rp640,565 miliar sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah. Inilah uang yang seharusnya diperuntukkan oleh daerah untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan untuk membangun berbagai fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan rakyat bagi terselenggaranya kehidupan yang layak dan harmonis.

Berdasarkan besaran pendapatan yang bakal diperoleh tersebut disusunlah berbagai keperluan dan program yang mesti didanai yang



kemudian dikelompokkan menjadi belanja langsung sebesar Rp 4,657 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp 3,611 triliun. Totalnya ternyata mencapai Rp 8,269 triliun, artinya terdapat defisit jika dibandingkan dengan rencana pendapatan yang telah diancang semula. Untuk menutupi defisit tersebut digunakan dana dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,150 triliun.

Meskipun sudah banyak aturan yang diberlakukan untuk membuat APBD dapat dinikmati oleh rakyat dalam arti yang sesungguhnya, namun tidak sedikit pula celah-celah yang dapat ditembus oleh berbagai kepentingan politis dan kolusif agar uang rakyat tersebut bisa mengocor ke dalam pusdi-pusdi diluar kemanfaatan rakyat tersebut. Dari kepentingan birokrasi pemerintahan ternyata APBD terkuras sampai Rp 1,207 triliun untuk belanja pegawai, yang terdiri dari belanja pegawai sebagai belanja tidak langsung sebesar Rp 975,893 milyar maupun belanja pegawai dalam komponen belanja langsung sebesar Rp 231,138 miliar. Keadaan ini mencerminkan betapa beratnya beban pengorbanan rakyat untuk memperoleh pelayanan dari aparat birokrasi yang diberinya amanah. Lebih menyakitkan lagi bila ternyata beban pengorbanan rakyat tersebut justru berbalik menyengsarakan rakyat atas nama pembangunan yang malah diamanatkan rakyat itu sendiri.

Tidak sedikit gambaran yang dapat ditampilkan betapa rakyat harus tergusur dan tersiksa oleh program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Ada yang namanya penggusuran dan ada pula yang namanya dampak dari sebuah pembuatan bangunan dan lain-lain. Rakyat juga sangat tertindas oleh berbagai sistem yang dibentuk demi dan atas nama pembangunan. Pemerintah justru menjadi penguasa yang menakutkan rakyat dengan segala kewenangan yang diberikan rakyat kepadanya. Belum lagi soal penyelewengan dan korupsi yang dilakukan. Semua itu menjadi keprihatinan tersendiri bagi rakyat atas nama pelayanan yang begitu tidak memadai yang dapat dinikmati rakyat dari uang sedemikian besar yang telah dipercayakan rakyat pada pemerintah.

Pada sisi yang lain lembaga-lembaga yang mengatasnamakan



rakyat dan memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan atas nama rakyat juga merepresentasikan hal-hal yang kurang terpuji secara hukum dan keputusan. Menerima suap dari apa yang menjadi kepercayaan rakyat untuk membetulkan dan memperbaiki. Mengkapling anggaran atas kepentingan rakyat dan atas nama bantuan sosial pada rakyat untuk membungkus kepentingan politik dan hasrat-hasrat individunya. Tak dapat dipertanggungjawabkan seberapa besar pula pengelabuan-pengelabuan dengan memprovokasi rakyat yang dilakukan untuk meraup kue APBD sehingga pemanfaatannya secara struktural menjadi terabaikan.

Setiap tahun di provinsi Riau dalam APBD dianggarkan adanya dana aspirasi masyarakat yang diusung melalui pintu anggota DPRD. Terlepas aspirasi tersebut dapat diuji kebenarannya atau tidak dalam perspektif *money follow the function* pengalokasian anggaran belanja negara dan daerah pembebanannya tetap dianggap dapat menimbulkan ketidakseimbangan anggaran. Tahun 2014 dana seperti ini mencapai kisaran angka Rp 1,3 triliun. Diguyuri dana aspirasi dan bantuan sosial yang berlimpah rakyat tentu saja sangat gembira. Tidak peduli anggaran yang dipotong tersebut disunat sana-sini, yang penting rakyat telah kebagian jatah APBD. Dari pada hanya bengong melihat aparat pemerintah memanfaatkan uang rakyat yang diamanatkan kepadanya.

Sungguh ironis sebenarnya bila dikaitkan dengan aspek kepatutan dan untuk apa anggaran pemerintah itu dibuat dan diselenggarakan. Azas yang seharusnya dipegang dalam merumuskan, menyusun dan mengelola anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah adalah tertib, taat peraturan, efektif, efisien, ekonomi, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan, dan manfaat. Perlu diingat bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai pada periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Menjadi sangat ironis jadinya dengan kesepuluh azas tadi dalam ukuran-ukuran kinerja yang hendak dicapai lebih terfokus pada bagaimana menyenangkan birahi-birahi politik dan mengisi pundi-pundi kepentingan aparat pemerintah semata.



Anggaran seharusnya menjadi alat perencanaan yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Merencanakan berbagai alternatif pembiayaan dari program yang disusun yang bersentuhan dengan pencapaian visi. Oleh karenanya akan sangat aneh bila anggaran hanya didasarkan pada aspirasi masyarakat yang tidak sejalan dengan visi yang telah disepakati bersama.

Anggaran juga merupakan alat kebijakan fiskal yang harus mampu menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk hal-hal yang berpotensi mematikan kreativitas dan inovasi ekonomi rakyat. Anggaran juga merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik. Oleh karena itulah pembuatannya membutuhkan *political skill*, *coalition building* dan pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan publik. Ini penting agar uang rakyat dan proses politik penganggarnya tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue APBD. Lebih penting lagi anggaran juga harus menjadi alat yang baku untuk menilai kinerja pemerintahan berdasarkan target yang direncanakan dan efisiensinya.

Akhirnya, dengan begitu besarnya sisa lebih anggaran setiap tahunnya, membengkaknya anggaran untuk kepentingan aparatur, menjadi-jadinya dana aspirasi dan bantuan sosial serta begitu lambatnya perumusan dan realisasi anggaran, masih dapatkan kita berharap pada anggaran APBD Riau untuk menjadi alat memotivasi masyarakat membangun kekuatan dirinya menghadapi tantangan hari esok yang tak kian mengecil ? Adakah azas-azas dan prinsip penganggaran masih dipegang dalam proses politik perumusannya, pengelolaannya dan pertanggung jawabannya. Ini semua akan menjadi duri dalam daging kehidupan kita, kini dan kelak di kemudian hari. Semoga tidak kian kisruh. Entahlah..!

\*\*\*\*\*



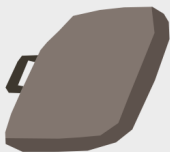
## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





TUMPAH TINDIH ANGGARAN ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN SELAMA INI  
BANYAK TERJADI DAN MASING-MASING ANGGARAN TERSEBUT TIDAK BERKAIT  
KENDALAN ANTAR SEKTOR DAN ANTAR WILAYAH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## RO POOR BUDGET

HaCipia Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Gubernur Riau yang baru seakan menunjukkan tajinya pada aspek anggaran pembangunan. Anggaran Belanja Daerah provinsi Riau mau dirasionalisasi. Pejabat diminta untuk siap berkegiatan di kantor dan fokus pada pembangunan di daerahnya. Perjalanan dinas yang tidak perlu harus dipangkas dan jumlahnya memang lumayan fantastis. Apalagi kalau hanya sekedar “kongkow-kongkow” ke Jakarta. Dana untuk itu harus dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lebih luas. Rapat-rapat yang tidak perlu akan dikurangi dan efisiensi anggaran dilakukan untuk membuat uang rakyat memang berguna bagi rakyat.

Ekspektasi rakyat Riau menggelembung mendengar statement pimpinan tertinggi Riau tersebut. Betapa tidak, selama ini banyak sekali anggaran yang mubazir dan belum berguna bagi kepentingan perbaikan kehidupan rakyat ditumpah ruah di depan mata rakyat. Menyedihkan memang tetapi rakyat tidak punya akses untuk memastikan aspirasi mereka terakomodir. Wakil-wakil rakyat justru tenggelam dalam keasyikan mempermainkan uang rakyat untuk kepentingan diri dan kroninya. Tidak sedikit anggota DPRD Riau yang harus diciduk oleh KPK dan entah berapa orang lagi yang akan menyusul.

Belum berjalan beberapa lama ekspektasi rakyat Riau nampaknya mulai mengerucut. Ada dua isu yang muncul dari penampilan gubernur yang baru, yakni ambisi beliau untuk merubah bentuk kantor gubernur



menjadi ber-kubah dan manajemen birokrasi yang berbau dinasti. Tanggapan yang muncul pun beragam. Untuk apa bercerita soal peduli kepada rakyat jika yang dilakukan hanyalah memaksakan ambisi pribadi untuk menunjukkan kekuasaan melalui rehabilitasi kantor gubernur dari ber-selendang menjadi ber-kubah. Sementara disatu sisi rakyat masih saja ber-kubang derita dan kesengsaraan.

Kepedulian terhadap rakyat tentunya tidak dapat didekati secara beradab. Berkunjung ke suatu desa dan memetakan pembangunan dari pengamatan sesaat sama artinya dengan “onani” pembangunan. Persoalan mendasar dalam mengubah rakyat dari tidak sejahtera menjadi sejahtera tidak mungkin dengan cara yang tidak strategis seperti itu. Anggaran tidak seharusnya diubah sedemikian rupa hanya karena menemukan sebuah rumah kumuh dan reot disebuah kampung. Justru yang harus dicari adalah bagaimana membangun kedigdayaan rakyat memperbaiki kesejahteraannya sehingga kemiskinan kultural yang mereka alami menjadi terentaskan. Jangan sampai malah secara kultural mereka tidak seharusnya menjadi miskin tetapi karena kebijakan struktural yang ada mereka malah terperangkap dalam kemiskinan.

Lantas bagaimana sebaiknya menyusun anggaran pembangunan untuk rakyat miskin? Menurut para ahli secara konseptual anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yg hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Sedangkan anggaran untuk rakyat miskin (pro poor) merupakan turunan dari kebijakan yang berpihak kepada kaum miskin (pro poor policy) sehingga merupakan bentuk tindakan afirmatif dalam pengarusutamaan kemiskinan (poverty mainstreaming) dalam kebijakan pembangunan. Jadi, manajemennya harus terdeskripsi dengan baik sesuai kebutuhan pemberdayaan rakyat miskin tersebut. Dalam implementasinya anggaran untuk rakyat miskin harus mengkombinasikan tiga perspektif kemiskinan, yakni struktural, gender dan institusional. Karenanya melakukan pembangunan untuk rakyat miskin tidak dapat dilakukan dengan asal “nyeletuk” dan asal buat. Rakyat tidak akan pernah mampu melepaskan



diri dari kemiskinan bila hanya didekati secara parsial dan menurut selera pejabat semata dalam mengentaskannya.

Kemiskinan rakyat bukan hanya disebabkan oleh kurangnya modal agregat semata. Tidak meratanya penguasaan aset ekonomi dan kurangnya akses masyarakat terhadap kebijakan penganggaran merupakan dua penyebab utama rakyat menjadi miskin. Kedua hal tersebut berkait kaitannya dengan tata kelola anggaran di daerah. Betapa naifnya bila uang rakyat yang mengucur ke Riau, baik melalui provinsi maupun kabupaten/kota yang mencapai Rp 25,84 triliun setiap tahunnya tidak sungguh-sungguh digunakan bagi kepentingan rakyat.

Arkeologi anggaran yang memihak rakyat miskin sebenarnya dimulai dari kebijakan pembangunan yang memang memihak pada rakyat miskin (*pro poor policies*). Dalam manajemen pembangunan daerah hal ini akan tercermin dari Renstra pembangunan daerah yang disusun setiap lima tahunnya. Kebijakan ini selanjutnya diturunkan dalam apa yang disebut sebagai *people oriented budget* atau anggaran yang merorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dari kedua hal itulah selanjutnya diturunkan menjadi *pro poor budget* atau anggaran untuk rakyat miskin sehingga pengalokasian uang rakyat tidak dilakukan secara serabutan dan parsial. Dengan demikian anggaran tersebut merupakan anggaran yang dapat diukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin.

Kerangka anggaran untuk rakyat miskin (*pro poor budget*) harus dimulai dari pematangan data sebagai inputnya yang berkenaan dengan siapa saja yang dikategorikan miskin disuatu wilayah, bagaimana karakteristik sosial dan geografisnya serta apa masalah dan kebutuhannya? Tanpa pemahaman yang jelas terhadap aspek-aspek input ini maka kebijakan *pro poor* untuk rakyat miskin tidak akan mengenai sasaran. Dari input inilah selanjutnya proses penganggaran untuk rakyat miskin dilakukan dengan cara membuka ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat miskin untuk berpartisipasi menentukan anggaran. Bila proses ini tidak berjalan maka sudah pasti anggaran itu juga tidak akan berkesesuaian dengan apa



yang seharusnya dilakukan untuk rakyat miskin. Walaupun kita sudah mengenalnya tetapi cara melakukan pemberdayaan terhadap mereka belum lagi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Kerangka selanjutnya berkenaan dengan dimensi APBD yakni pemerintah tidak boleh mendapatkan pendapatannya yang berdampak pada bertambahnya beban rakyat. Pajak dan retribusi haruslah sesuai dengan kemampuan rakyat untuk membayarnya. Pengelolaan sumberdaya tidak diperkenankan mengurangi kesempatan rakyat miskin untuk memperoleh pendapatan. Artinya, dari aspek pendapatan daerah jangan sampai justru membebani rakyat miskin. Sedang disisi pengeluaran pemerintah ditempuh dengan cara mendahulukan kepentingan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Bukannya mempercantik kantor-kantor pemerintah dan kursi-kursi pejabat yang duduk di dalamnya. Output anggaran pemerintah yang pro poor pada hakikatnya adalah meringankan beban orang miskin, mengurangi pungutan bagi usaha ekonomi rakyat miskin, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Adapun outcome yang diharapkan dari anggaran pro rakyat miskin seperti itu terarah pada dua sisi yakni meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin, khususnya dari aspek pendapatan rumah tangganya dan berkurangnya pengeluaran karena hak-hak dasarnya telah terpenuhi dengan baik secara lebih murah.

Berpedoman pada arkhelogi dan kerangka anggaran untuk rakyat miskin (*pro poor budget*) tentunya tidak mungkin dilakukan rasionalisasi APBD Riau hanya atas dasar selera pimpinan semata. Bila memang betul ingin menempatkan Riau sebagai provinsi yang peduli rakyat miskin maka sinergi antar level pemerintahan mutlak diperlukan untuk membuat anggaran daerah bisa sejalan dengan perspektif perbaikan kesejahteraan rakyat. Timpang tindih anggaran antara provinsi dan kabupaten selama ini banyak terjadi dan masing-masing anggaran tersebut tidak berkait kelindan antar sektor dan antar wilayah. Kesan mubazir dan sia-sia menjadi lebih mengemuka. Begitu banyak anggaran yang dialokasikan selama ini hanya dari cara pandang yang keliru para pemimpin terhadap



bagaimana upaya terbaik menyejahterakan rakyat. Berbagai bangunan yang dibuat hanya menjadi sarang penyakit masyarakat dan bahkan terlilit hutang-piutang. Ke depan masalah ini harus dihindari untuk memperoleh anggaran yang betul-betul mampu meningkatkan pendapatan rakyat dan mengurangi beban hidup mereka sehingga mereka sampai pada taraf kesejahteraan yang membuat mereka menjadi ada, diakui dan berguna di tanah Melayu tercinta ini. Semogalah !

\*\*\*\*\*

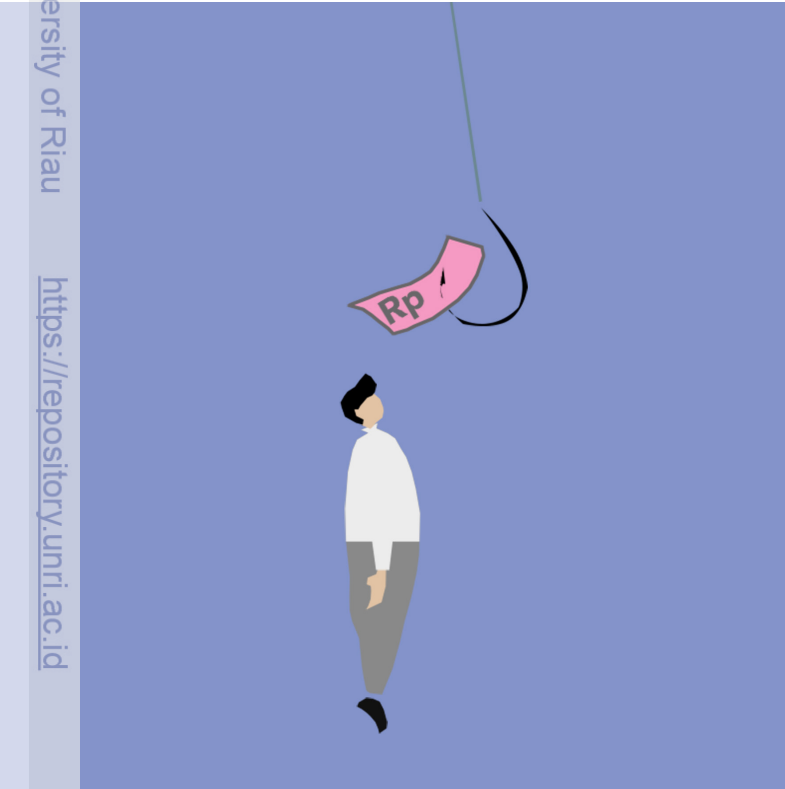
1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dianggap mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



TIDAK SULIT SEBENARNYA MASYARAKAT MENDETEKSI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENAWARKAN INVESTASI BODONG INI. CIRI KHASNYA ADALAH MENAWARKAN KEUNTUNGAN ATAU IMBAL HASIL YANG TINGGI DALAM JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN YANG PENDEK.



# FENOMENA INVESTASI BODONG

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Walaupun Charles Ponzi asal Italia yang menciptakan “arisan berantai” pada tahun 1920 ternyata masih dipelihara sampai saat ini. Walau diganjar dengan hukuman 150 tahun penjara ternyata apa yang diprakatekkan Ponzi yang lebih dikenal dengan skema ponzi tidak membuat jera para pemburu untung untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat yang didorong oleh nafsunya memperoleh keuntungan tanpa batas dan seakan bebas risiko. Betapa menggiurkan bila ada investasi yang menghasilkan bunga 50 persen dalam 45 hari dan menjadi 100 persen dalam 90 hari. Menjual gagasan seperti itu Ponzi mampu meraup dana dari pesertanya mencapai US\$ 222 juta. Namun pada akhirnya ia harus terhutang sampai US\$ 7 juta dan meninggal di penjara Rio de Janeiro Brazil setelah menjalani 14 tahun penjara.

Di berbagai belahan dunia cara-cara yang dipraktek Ponzi tidak kunjung usai dipraktekan dengan model-model dan pola-pola yang semakin disempurnakan. Masyarakat yang terbabitpun tak berkurang. Sebut saja apa yang dilakukan Bernard Maddof melalui perusahaan investasinya Bernie Maddof mampu menggondol dana mencapai US\$ 17,3 miliar. Sama halnya dengan R. Allen Stanford yang juga mampu meraup dana dari 28.000 nasabah sebanyak US\$ 7 milyar. Thomas Petters ditangkap tahun 2008 dan dinyatakan bersalah dengan tuduhan penipuan dan pencucian uang mencapai US\$ 3,6 milyar. Pada akhirnya dijatuhi



hukuman penjara selama 50 tahun.

Kasus-kasus investasi bodong ini di Indonesia juga marak terjadi. Banyak korban yang menderita kerugian. Pola dan mekanismenya makin canggih. Sejalan dengan perkembangan *financial technology* dan dinamika perekonomian yang kian deras investasi-investasi illegal ini tumbuh bak endawan dimusim hujan. Masyarakat tak merasa kapok karena perilaku keuangan (*financial behavior*) yang muncul ditengah-tengah masyarakat kian tak rasional. Permainan skema investasi ini tidak hanya ada pada sistem keuangan konvensional. Ada pula perusahaan-perusahaan berbendera variabel terkait dengan pengelolaan keuangan yang illegal ini. Sebenarnya secara institusi perusahaan ini masih memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Tidak mungkin mereka tidak memiliki izin pendirian perusahaan. Hanya saja izin usaha secara teknik dan spesifik tidak ada sehingga dapat dianggap illegal.

Pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 297 buah *fintech* illegal yang menerapkan pinjaman *online* berbentuk *fintech peer to peer lending*. Sampai dengan tahun 2019 Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup sebanyak 1773 *fintech lending* illegal. Basis servernya tidak saja di Indonesia tetapi ada yang berbasis di Amerika sekitar 15 persen, China 6 persen, Singapore 8 persen. Bahkan sekitar 42 persen perusahaan belum diketahui basis servernya. Semua perusahaan keuangan ini memainkan skema-skema yang berpijak pada apa yang dilansir Ponzi. Kerugian masyarakat tak dapat terelakkan karena orang-orang yang direkrut berinvestasi pada usia permainan semakin lama semakin kecil kemungkinan memperoleh keuntungan.

Indonesia menjadi pasar yang seksi bagi praktek-praktek keuangan illegal ini karena peluang pasarnya sangat gemuk. Kelas menengah rakyat Indonesia makin banyak karena jumlah penduduk yang besar. Kehidupan kelas menengah ke atas yang lebih baik dari hasil pendapatan di sektor primer namun Pendidikan dan pemahaman akan investasi keuangan yang masih rendah menjadi pasar sasaran yang sangat empuk. Pelaku UMKM yang secara kebetulan mampu memperoleh keuntungan yang



memadai cukup rentan untuk terbabat dalam sistem investasi ilegal ini.

1. Bagaimana pun perbaikan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDB) membuat perilaku konsumsi masyarakat Indonesia berubah. Termasuk dorongan mereka untuk melakukan investasi yang menjanjikan keuntungan lebih.

Kerugian akibat investasi bodong di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir sudah mencapai Rp 88,8 triliun rupiah. Bayangkan saja perusahaan Pandawa Group dengan bisnis travel Umrah nya tetapi dikelola dengan gaya skema ponzi mampu memakan korban sebanyak 49.000 orang dengan kerugian mencapai Rp 3,8 triliun. PT Cakrabuana Sukses Indonesia melibatkan sekitar 170 ribu orang menimbulkan kerugian mencapai Rp 1,6 triliun. *Dream Freedom* bahkan menyebabkan kerugian mencapai Rp 3,7 triliun dengan korban sebanyak lebih kurang 700.000 orang. Bahkan arisan ibu-ibu di Serang pun mampu menimbulkan kerugian mencapai Rp 5 milyar. Kasus terakhir adalah investasi bodong dengan menggunakan aplikasi Memiles di Jawa Timur yang dilakukan PT Kam and Kam hanya dalam waktu beberapa bulan beroperasi mampu meraup dana mencapai Rp 750 milyar. PT. Krisna Alam Sejahtera (KAS) di Klaten meraup dana sebesar Rp 17 milyar dengan korban mencapai 1000 orang lebih.

Pada dasarnya investasi bodong paling banyak dalam bentuk *forex* dan perdagangan saham serta reksa dana. Indonesia memang sedang demam dengan intervensi perusahaan-perusahaan investasi ini. Masyarakat banyak yang tergiur karena piawainya para *marketer* nya menawarkan investasi dengan keuntungan atau imbal hasil yang besar dan seakan-akan bebas risiko. Masyarakat menjadi terjebak dengan permainan aplikasi yang menggambarkan seolah-olah keuntungan yang nyata akan diperoleh dengan investasi ini dalam jangka waktu yang pendek. Tanpa lebih teliti menyibak izin usahanya secara cermat dan teliti masyarakat terdorong dan terperangkap dalam cengkraman perusahaan *illegal* atau yang beroperasi tanpa izin usaha resmi. Berbekal pengetahuan dan pemahaman yang tidak memadai tentang keuangan atau *financial*



*product and institution financial behavior* masyarakat tanpa ragu menanamkan dananya tanpa kalkulasi yang matang.

Adanya, masyarakat yang terkena bukan hanya golongan bawah tetapi masyarakat golongan atas yang justru jadi penggerak pula bagi masyarakat bawah tersebut. Bagi masyarakat kelas atas uang yang digunakan bisa saja uang lebih atau bahkan uang haram. Akibat perilaku mereka timbul magnet bagi masyarakat kelas bawah untuk ikut-ikutan mengharap keuntungan segera. Begitu menggiurkan dan bukan tidak ada orang yang beruntung mendapatkan hasil lebih dalam jangka pendek. Apalagi bagi yang lain sangat menyakitkan. Ada orang yang investasinya berulang-ulang dan pada periode ke periode menanamkan uang kian besar pada akhirnya justru berujung pada tenggelamnya semua uang yang diinvestasikan.

Menghadapi fenomena ini tentunya sudah bukan waktunya untuk mengangap enteng. Dampak-dampak sosial yang bakal muncul sebagai muara akhirnya sangat mencemaskan. Pemerintah harus lebih antisipatif dengan melakukan deteksi dini untuk tidak memberi izin bagi adanya usaha-usaha ekonomi dengan pola yang sangat berisiko merugikan masyarakat. Perlu ada kebijakan khusus dan selektif melalui persyaratan-persyaratan tertentu sebelum mereka meluncur ke pasar. Sosialisai dan edukasi berkenaan dengan financial technology dan program inklusi keuangan harus lebih massif dan intensif. Literasi digital tentang investasi mutlak diperbanyak dengan melibatkan berbagai institusi masyarakat. Perlu dilakukan ekstensifikasi atau perluasan pasar bagi pelaku ekonomi bidang keuangan, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memberi ruang dan peluang masyarakat berinvestasi. Guna memupuk pengendalian diri masyarakat untuk menggunakan uang yang dimiliki secara benar perlu penyediaan berkelanjutan akan kemanfaatan uang tersebut. Inilah fungsi sinergi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, tindakan tegas bagi pelaku-pelaku bisnis ilegal harus ditingkatkan untuk menghambat menjamurnya usaha ini. Bagi



investor sendiri yang masih tergiur untuk berinvestasi pada usaha-usaha itu harus pula diciptakan efek jera. Tak mungkin pemerintah akan mengganng kerugian terhadap perilaku-perilaku masyarakat yang kurang pantas. Tidak sulit sebenarnya masyarakat mendeteksi perusahaan-perusahaan yang menawarkan investasi bodong ini. Ciri khasnya adalah menawarkan keuntungan atau imbal hasil yang tinggi dalam jangka waktu pengembangan yang pendek. Kemudian biasanya mereka menawarkan produk menarik dengan melakukan rekrutan pemasar secara berjenjang dengan menawarkan bonus yang berlipat sesuai jenjang pemasarnya.

Secara makro kiranya perlu ada perbaikan dalam kualitas pertumbuhan ekonomi agar ada pemerataan ekonomi yang meluas dan berkelanjutan. Menciptakan kepemilikan saham berimbang sehingga tidak ada pemusatan ekonomi yang dapat mengurangi kesempatan rakyat berinvestasi dan berusaha ekonomi produktif secara meluas. Mendorong timbulnya inovasi produksi yang beragam untuk mengembang potensi-potensi ekonomi yang tersedia untuk membuka lapangan kerja dan usaha-usaha bernilai tambah ekonomi yang efisien dan efektif. Ontah lah !!!

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dianggap mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Apakah itu melalui penumbuhan usaha bersama yang berjejaring, *sharing* saham ataupun saham unjuk, dan memperbesar program CSR guna meningkatkan *skill* dan martabat rakyat. Pada dasarnya rakyat tidak takut miskin karena memang itu sudah menjadi *perasaiannya* selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## PAKSIAT KEMBALI TERANCAH MISKIN ?

Bank Dunia merilis sebuah kajian ataupun laporan dengan judul *Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class*. Inti laporan tersebut pada dasarnya menyatakan keberhasilan Indonesia memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya sejak 50 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi terjaga pada kisaran 5,6 persen. Dari jumlah mereka yang miskin pada tahun 1993 sebanyak 80 persen tidak lagi miskin. Satu diantara lima orang Indonesia ekonominya ada dalam posisi aman. Jumlahnya mencapai 52 juta orang. Kelas menengah inilah yang memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian Indonesia.

Sejatinnya ada 115 juta orang yang telah mampu keluar dari kemiskinan namun masih rentan untuk kembali jatuh miskin. Di Indonesia bahagian ini dalam laporan tersebut yang menjadi seksi dan kemudian diolah sedemikian rupa menjadi komoditas politik. Kata rentan diperjelmahkan sebagai ancaman yang serius. Aspek positif dan upaya-upaya untuk menjaga itu seperti dikesampingkan. Padahal *World Bank* ingin mengingatkan bahwa majunya Indonesia dan harapannya untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi akan tergantung pada bagaimana mengelola umat yang 115 juta ini ke depannya. Bayangkan saja, sejak 2002 konsumsi kelompok ini tumbuh rerata 12 persen setiap tahunnya.

Untuk itulah, menurut *World Bank Acting Country Director* untuk



Indonesia. Roland Pryce diperlukan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi makin baik. Caranya adalah menciptakan suasana dimana kelas menengah yang telah mentransformasi diri berubah dari masyarakat miskin semakin memiliki mobilitas ekonomi yang tinggi. Ini akan berdampak pada bertambahnya kelas menengah yang baru. Infrastruktur yang memadai serta Pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan perkembangan jaman menjadi prasyarat mutlak untuk itu. Termasuk jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas, air bersih dan sanitasi yang baik, dan tentunya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga rakyat merasa bahwa pemerintah menjadi mitra yang sinergis bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Bila didesapi sinyal ini dengan sadar maka seandainya bangsa ini ingin menjadi bangsa besar dan berkeadilan momentum untuk itu sedang terjadi sekarang. Namun bukan dengan sentiment-sentimen politik yang tidak terukur. Kebijakan pembangunan yang terarah sesuai prasyarat yang dianjurkan World Bank tadi akan menjadi penting diimplementasikan. Tidak gampang mengubah orang dari miskin menjadi tidak miskin. Apalagi kemiskinan itu adalah kemiskinan kultural. Namun di Indonesia kemiskinan struktural lah yang dominan sehingga terapi untuk penyelesaiannya lebih pada bagaimana negara dikelola semakin efisien dan efektif dan rakyat tidak dibawa ke dalam suasana yang secara politik makin menjadi miskin, khususnya secara moral dan produktivitas.

Di Riau selama periode 2011 sampai dengan 2019 pengurangan penduduk miskin sangat tidak signifikan. Prosentase penduduk miskin pada bulan Maret 2011 adalah sebesar 8,47 persen. Sedangkan pada posisi Maret 2019 prosentase penduduk miskin masih sebesar 7,08 persen. Artinya, selama delapan tahun terakhir kita hanya mampu memperkecil prosentase penduduk miskin hanya sebesar 1,39 persen. Keluar-masuknya penduduk dalam batas garis kemiskinan masih tinggi atau lebih rentan. Padahal kenaikan Garis Kemiskinan hanya sekitar 4,31 persen per tahunnya. Untungnya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Riau semakin menurun. Pada Maret 2018 tingkat kedalaman kemiskinan



di Riau sebesar 1,2 sedangkan Maret 2019 turun menjadi 1,13 dan tingkat keparahan kemiskinan turun dari 0,30 menjadi 0,20. Artinya, pintu untuk membuat masyarakat keluar dari kemiskinan cukup leluasa untuk dimasuki karena jarak pendapatan rakyat miskin dari garis batas kemiskinan sudah makin dekat dan disparitas pendapatan antar penduduk miskin relatif rendah.

Riau sangat dinamis dalam aspek mobilitas penduduk sehingga diperlukan sinergi kebijakan antar daerah dalam menangani penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Pengelolaan ekonomi daerah yang lebih berkualitas menjadi tantangan utama. Keterkaitan pembangunan antar wilayah sehingga memberi efek yang lebih efisien harus ditumbuhkan dengan kesiapan pemerintah provinsi mengembangkan kebersamaan dan sinergisasi program. Baik antar sektor maupun antar wilayah. Fungsi dan kewenangan masing-masing level pemerintahan diselaraskan satu sama lain sehingga pada akhirnya membentuk kesatuan program yang saling melengkapi.

Dalam penanggulangan kemiskinan diarahkan pada wilayah pedesaan melalui upaya-upaya pengurangan pengeluaran rumah tangga, penyediaan MCK dan sumur-sumur air bersih bersama guna meningkatkan sanitasi, mendorong perbaikan gizi rakyat dengan sumber bahan pangan yang mandiri. Selanjutnya pemberantasan kemiskinan diarahkan pada rekayasa sosial dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang diharapkan mampu mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan secara tanggung-renteng, menumbuhkan perekonomian desa guna meningkatkan pendapatan masyarakatnya dengan menggali sumber-sumber ekonomi desa yang produktif dan marketable, dan memberikan kredit kepada pelaku-pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah agar lebih produktif dan memiliki skala usaha yang lebih besar sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peran organisasi organisasi non pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pada era milenial dewasa ini program pengentasan kemiskinan



tentu perlu pula adanya penyesuaian. Perkembangan teknologi dan mobilitas informasi yang amat deras harus menjadi pertimbangan yang signifikan. Masyarakat akan mudah jatuh kembali miskin hanya karena ketidaksiapan berhadapan dengan dinamisnya era digital. Literasi digital menjadi mutlak diperlukan agar pondasi struktur penanggulangan kemiskinan yang dibangun sebelumnya tidak runtuh sia-sia. Bayangkan saja, hanya dalam waktu singkat akibat permainan judi online, arisan online, dan pinjaman-pinjaman online masyarakat menjadi terhempas dalam kerugian dan membuat mereka kembali dalam cengkeraman dan kesengsaraan kemiskinan.

Dalam laporan Bank Dunia tersebut disarankan bahwa ke depan bagi pemerintah Indonesia perlu adanya reformasi untuk kontrak sosial baru yang mengikat negara dan warganya yang semakin makmur ke dalam pengaturan yang saling menguntungkan. Inisiatif oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih berkualitas sehingga mampu menciptakan jalur untuk mobilitas ke atas melalui pekerjaan yang lebih baik. Ketahanan ekonomi dijaga melalui perlindungan sosial yang lebih kuat. Pendapatan pajak yang meningkat akan diperlukan guna memelihara kesinambungan program pembangunan. Ini berarti perlu ada kehati-hatian dalam menentukan kebijakan agar masyarakat tidak terdorong menunjukkan perilaku baru yang justru kotraproduktif terhadap pembangunan sebagai akibat adanya perbaikan pendapatan. Perubahan pendapatan akan mendorong adanya perubahan konsumsi dan secara sosial akan menampilkan perubahan perilaku pula.

Pada sisi lain semakin dituntut pula adanya redistribusi aset ekonomi. Masyarakat yang kian berdaya akan semakin menuntut adanya peningkatan pelayanan dan media untuk mereka menjadi semakin eksis. Pemahaman terhadap hak-hak sosial dan ekonomi semakin tinggi. Ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang selama ini seperti dipelihara akan semakin sensitif dan dapat menjadi sumber kerawanan sosial. Tuntutan akan kesamaan hak dimata hukum akan meningkat. Pemerintah harus kian menyadari akan peranannya sebagai wasit yang adil. Secara



berkesinambungan pemerataan ekonomi dan keadilan harus makin ditumbuhkan melalui kebijakan-kebijakan yang jelas dan tegas.

Penguasaan aset ekonomi berlebihan yang menumbuhkan *hegemony* ekonomi harus dipangkas. Ekonomi kemitraan yang membangun kesejahteraan bersama hendaklah dipupuk dengan baik. Pemerintah harus mendorong kelas menengah ke atas menjadi pemicu timbulnya kesejahteraan bersama. Apakah itu melalui penumbuhan usaha bersama yang berjejaring, *sharing* saham ataupun saham unjuk, dan memperbesar program CSR guna meningkatkan *skill* dan martabat rakyat. Pada dasarnya rakyat tidak takut miskin karena memang itu sudah menjadi *perasaannya* selama ini. Namun bersama-sama hidup sejahtera di Indonesia ini tentunya akan lebih nyaman dan membahagiakan, baik bagi si kaya maupun yang masih dalam lingkaran kemiskinan. *Ontah lah !*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

